

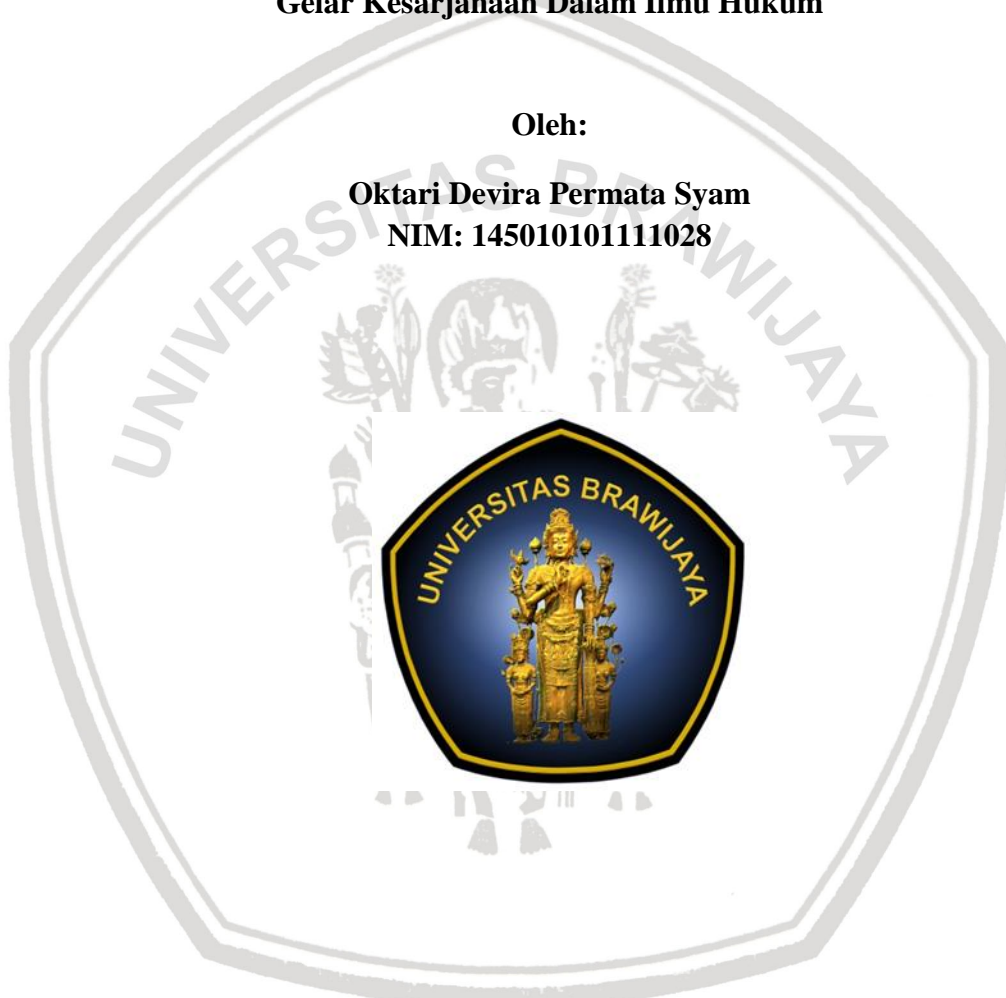
**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PRINSIP *DE MINIMIS* DAN
SUBSTANSIAL SIMILARITY DALAM HUKUM HAK CIPTA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Oktari Devira Permata Syam
NIM: 145010101111028**



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PERBANDINGAN PRINSIP DE MINIMIS
DAN PRINSIP SUBSTANSIAL SIMILARITY DALAM HUKUM HAK
CIPTA DI INDONESIA**

**OKTARI DEVIRA PERMATA SYAM
NIM : 145010101111028**

**Sripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 7
Juni 2018 dan disahkan pada tanggal:**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Afifah Kusumadara SH., LL.M., SJD
NIP. 197409092006011002

Moch. Zairul Alam,
NIP. 197409092006011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 19720622 2005011002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 12 Juni 2018

Yang menyatakan,

Oktari Devira Permata Syam

NIM. 145010101111028



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada

1. Nurna Yanti selaku Ibunda penulis dan Samsul Hidayat selaku Ayah penulis, atas segala doa dan segala upaya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ratu dan Putri selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan juga doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Zairul Alam, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Afifah Kusumadara, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Adin, Astari, Tika, Lolo, Candra, Cires, Fitri, Pije, dan Ufa sahabat satu atap penulis sejak hari pertama berada dimalang.
8. Avi tiara, Amalia Rizki, Fidya Titisari dan Vicky Rizaldi teman teman penulis dibangunku perkuliahan fhub.
9. Keluarga dari bapak Zairul Alam, atas segala kebaikan kepada penulis.
10. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FHUB) yang bekerja sama membangun dan belajar berorganisasi
11. Kepada teman-teman Bussines Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan semangat, masukan dan bantuan yang sangat berharga.
12. Kepada kakak-kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini

Malang, 21 Mei 2018

Oktary Devira Permata Syam

RINGKASAN

Oktari Devira Permata Syam, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2018, ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PRINSIP DE MINIMIS DAN PRINSIP SUBSTANSIAL SIMILARITY DALAM HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA, (Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD., M. Zairul Alam, SH., MH.).

Kemiripan yang substansial terhadap sebuah ciptaan yang satu dengan yang lain sering sekali ditemui di Indonesia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian tertentu, terlebih lagi bagi pihak yang ciptaannya telah lahir terlebih dahulu namun kemudian, pada ciptaan milik pencipta lain yang baru saja diciptakan, memiliki kemiripan yang substansial didalamnya. UUHC sendiri telah mengatur hal mengenai kemiripan yang substansial antara sebuah ciptaan yang disebut dengan istilah “persamaan pada pokoknya” atau yang dalam skripsi ini disebut dengan istilah prinsip substansial similarity. Berbicara mengenai sebagian yang substansial berarti tidak harus selalu menggunakan keseluruhan dari sebuah ciptaan, melainkan hanya menggunakan sebagian kecil saja. Hal ini berhubungan dengan prinsip lain yang disebut dengan istilah de minimis. Baik didalam UUHC tahun 2002 maupun tahun 2014, keduanya mengatur prinsip ini, namun terdapat perbedaan penjelasan didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah perbandingan pengaturan prinsip De Minimis dan Prinsip Substansial Similarity pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana penerapan prinsip De Minimis dan prinsip Substansial Similarity dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika?

Kemudian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak cipta yaitu TRIPs, Konvensi Berne 1971, WIPO Copyright Treaty, United State Copyright Act 1976, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer beserta implementasinya, dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang berupa buku literatur, jurnal, hasil-hasil penulisan ilmiah, penelusuran internet, dan Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, perbandingan pengaturan prinsip de minimis dan prinsip substansial similarity pada undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu keduanya mengatur secara kualitatif dalam menentukan prinsip substansial similarity. Berarti dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa bagian substansial dari karyanya memang ditiru oleh pihak lain. Sedangkan tergugat harus mempunyai defense bahwa hal tersebut (yang dimaksud penggugat merupakan substansial similarity). Tergugat dalam hal ini melakukan defense “de minimis” sebagai lawan dari “substansial similarity”. Pengakomodasian prinsip de minimis belum diatur secara jelas dalam UUHC. Sedangkan, di Amerika sendiri baik de minimis maupun substansial similarity sendiri sudah digunakan dalam kasus kasus pelanggaran hak cipta.



SUMMARY

Oktari Devira Permata Syam, Economics and Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in June 2018, A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE JURIDICAL PRINCIPLE OF DE MINIMIS AND SUBSTANTIAL SIMILARITY IN COPYRIGHT LAW IN INDONESIA, (Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD., M. Zairul Alam, SH., MH.).

Substantial similarity of creation with one another so often found in Indonesia. This is certainly could pose a particular disadvantage, especially for a party creation was born first, but later on the other creator-owned creation has just been created, has a substantial resemblance in it. UUHC itself has been set regarding the substantial similarity between a creation that is referred to by the term "equation in anyway" or that in this thesis termed substantial similarity principle. Talking about some substantial means not having to always use the entirety of a creation, but only use a small part of the course. It is related to other principles referred to by the term de minimis. Either in the year or years 2002 UUHC 2014, both set up these principles, but there is a difference of explanation inside.

Based on the above, this paper raised the problem formulation: (1) how does the comparison principle of De Minimis arrangements and Substantial Similarity Principle in Act No. 19 of 2002 concerning copyrights and on Act No. the 28 of 2014 about copyright? (2) How the application of the de minimis principle and the principle of substantial similarity in its application on cases that occurred in Indonesia and in America?

Then the kind of research used in this research is research juridical normative. Raw materials primary law in this study of the regulations relating to copyright, namely TRIPS, The Berne Convention of 1971, the WIPO Copyright Treaty, the United States Copyright Act 1976, Act No. 28 of 2014 on Copyrights, materials secondary law, namely materials that provide information relating to the sources of primary legal materials and its implementation, is done by reviewing literature search and literature related to the topics of research in the form of literature books, journals, results of scientific writing, surf the internet, and legal materials tertiary, namely materials that can complement the primary legal materials and secondary legal material in the form of a dictionary, which is composed of Indonesian dictionaries, legal dictionaries, and various other dictionaries needed.

Of research results with the method above, the comparison principle of de minimis arrangements and substantial similarity principle in Act No. 19 of 2002 concerning copyrights and on Act No. 28 of 2014 about copyright that is both regulating principle in determining the qualitatively substantial similarity. Means

in this case the plaintiff must be able to prove that a substantial part of his work is indeed copied by others. While the defendant must have a defense that this (is the plaintiff is substantial similarity). The defendants in this case did a defense of "de minimis" as opposed to "substantial similarity". The use of the principle de minimis has not been regulated explicitly in copyright law in Indonesia. Whereas, in the US either de minimis or substantial similarity was used in the case of copyright infringement.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
C. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	Error! Bookmark not defined.
1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual..	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
3. Hak Ekonomi dan Hak Moral ...	Error! Bookmark not defined.
4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Prinsip <i>Substansial Similarity</i> .	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan tentang Prinsip <i>De Minimis</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah De Minimis.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penggunaan De Minimis	Error! Bookmark not defined.
3. Faktor-faktor <i>De Minimis</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Teori Penggunaan Doktrin <i>De Minimis</i> ..	Error! Bookmark not defined.
 BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

C. Jenis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
F. Definisi Konseptual	Error! Bookmark not defined.
 BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Prinsip Substansial Similarity dan De Minimis dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dan Undang Undang Hak Cipta 2014	Error! Bookmark not defined.
1. Gambaran Umum Prinsip <i>Substansial Similarity</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Gambaran Umum Prinsip <i>De Minimis</i>	Error! Bookmark not defined.
3. <i>Substantial Similarity</i> dan <i>De Minimis</i> di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 dan Undang Undang Hak Cipta Tahun 2014	Error! Bookmark not defined.
B. Penerapan Prinsip <i>Substansial Similarity</i> dan Prinsip <i>De Minimis</i> dalam Kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia dan Di Amerika Serikat	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Substantial similarity</i> dan <i>De Minimis</i> dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat	Error! Bookmark not defined.
2. Penerapan Prinsip <i>Substansial Similarity</i> dan Prinsip <i>De Minimis</i> dalam Kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia dan Di Amerika Serikat.....	90
 BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
 DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	8
Tabel 1.2	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para filsuf Yunani Kuno merupakan salah satu penggagas yang mengembangkan ide negara hukum. Plato, dalam bukunya yang berjudul “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, beliau berpendapat bahwa suatu negara dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada supremasi hukum. Sependapat dengan Plato, Aristoteles pun mengatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan menggunakan supremasi hukum.¹ Pendapat yang disampaikan oleh kedua filsuf Yunani Kuno ini merupakan salah satu asal muasal dianutnya konsep negara hukum oleh hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia adalah Negara Hukum.² Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan beberapa prinsip sebagai suatu konsekuensi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, salah satunya prinsip *Supremacy of Law*, yang berarti setiap masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan akan diselesaikan melalui hukum sebagai pedoman yang paling tinggi. Hal ini berarti, hukum selalu mengiringi masyarakat disemua aspek kegiatan didalam kehidupan bernegara, tak terkecuali didalam lingkup hak kekayaan intelektual.

¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, **HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi**, PT: Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.

² Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai.

Perlindungan terhadap hak milik intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Disepakati pula kerangka dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasi pada bulan Januari 1995 termasuk didalamnya TRIP'S (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Good*) lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

HKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah suatu karya cipta. Karya cipta, perlu mendapatkan perlindungan guna mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, memperbanyak, serta memperdagangkan hasil karya cipta orang lain. Maka dari hal tersebutlah muncul pengaturan tentang Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, sebab mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.³ Hal ini berarti, hak cipta sendiri memiliki sifat yang bertujuan untuk melindungi suatu karya atau ciptaan yang dibuat oleh musisi, penulis, programmer komputer, dan lain sebagainya dari perbuatan orang lain yang tanpa izin memperbanyak, meniru, atau mengumumkan sebuah karya cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang harus dilindungi karena sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu hasil karya. Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting di era ekonomi global. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Terlebih lagi di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan hal-hal lain. Dengan begitu ini menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

negaranya. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.⁴

Perlindungan sebuah karya cipta salah satunya dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta tersebut. Tujuan dari didaftarkannya karya cipta tersebut selain keuntungan dari sisi ekonomi juga untuk mengklaim hasil karya dari pencipta tersebut bahwa hak cipta itu adalah miliknya. Sebelum adanya karya cipta lain yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan daripada karya cipta miliknya.

Sebab, Indonesia merupakan Negara yang memiliki suku budaya yang beraneka ragam. Negara yang dapat dikatakan cukup besar, baik wilayah maupun penduduknya. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banyak kesamaan atau kemiripan dalam sebuah karya cipta yang dihasilkan dengan karya cipta yang telah ada sebelumnya, baik sengaja ataupun tidak. Hal tersebut bisa disebabkan oleh cara pemikiran yang sama ataupun ketidaktahuan bahwa karya cipta tersebut memiliki sebuah kesamaan. Namun, peniruan "ide" sering terjadi sehingga menimbulkan ciptaan yang mempunyai kemiripan dengan meniru "ide" dari ciptaan orang lain yang terlebih dahulu lahir. Tentunya hal ini sangat berpengaruh didalam hak cipta. Terlebih lagi jika kesamaan yang terdapat dalam karya cipta tersebut merupakan sebuah kesamaan yang substansial dari karya yang telah ada sebelumnya. Sebab, seperti yang kita ketahui hak cipta memiliki unsur ekonomi bagi pemilik hak cipta tersebut. Jika kesamaan yang substansial ini terjadi tentunya dapat merugikan pihak yang lebih dulu mengantongi hak cipta.

⁴ Khoirul Hidayah, **Hukum Hak kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, UINMaliki Press, 2013, hlm. 37.

Di era globalisasi ini, pemanfaatan akses internet semakin mudah dan murah digunakan. Penggunaan teknologi juga semakin dikuasai masyarakat. Tentunya semakin menjadi salah satu pemicu terjadinya kemiripan dalam sebuah pembuatan karya cipta. Sebab plagiasi terhadap sebuah karya cipta bisa saja dilakukan.

Hak cipta bisa dikatakan dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah bagian yang ditiru merupakan bagian menjadi khas atau substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, terdapat unsur pembeda atau unsur yang mudah dikenali.

Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar.

Akibat dari kemiripan atau kesamaan dalam hak cipta tersebut, terciptalah sebuah prinsip yang dapat digunakan apabila terjadi sebuah persengketaan hak cipta akibat adanya unsur kesamaan. Prinsip yang dimaksud adalah *Substantial Similarity* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memecahkan kasus pelanggaran Hak Cipta dengan cara membandingkan tingkatan kemiripan diantara 2 (dua) ciptaan. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan apabila karyanya telah ditiru, atau karya lain tersebut telah meniru karyanya.

Substantial Similarity juga sering diartikan sebagai “persamaan pada pokoknya”, karena memang hal tersebutlah yang dipermasalahkan dalam hal ini. Pelanggaran dalam Hak Cipta sangat berkaitan erat dengan konsep *Substantial Similarity*.

Contohnya seperti pada kasus film milik Raditya Dika berjudul “*Hangout*” yang diklaim bahwa cerita didalamnya memiliki unsur kemiripan yang substansial dengan Novel milik Agatha Christie yang berjudul “*And Then There Were None*”. memang didalam film garapan Raditya Dika tersebut memiliki kemiripan yang cukup substansial.

Berbicara mengenai bagian yang substansial terhadap sebuah karya cipta, berarti tidak selalu menggunakan keseluruhan dari karya cipta tersebut. Melainkan bisa saja menggunakannya dalam sebagian kecil, namun bagian tersebut adalah bagian yang menjadi ciri khas sebuah karya cipta. Menggunakan sebagian kecil yang memiliki kemiripan tersebut juga berhubungan dengan prinsip hukum yang lain, yaitu prinsip *De Minimis*. Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwa *De Minimis* berhubungan dengan segala sesuatu yang kecil.

Prinsip *De Minimis* adalah pandangan dimana suatu perkara seharusnya tidak menjadi kasus persidangan di pengadilan karena dianggap terlalu kecil atau remeh. Dalam konteks perlindungan Hak Cipta, prinsip ini digunakan apabila pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dalam bentuk penggunaan, pengambilan, penggandaan, ataupun pengubahan sebuah karya cipta, maka ia mengakui bahwa ia memang melakukannya, tapi ia hanya mengambil sebagian kecil dari isi atau konten karya tersebut dan sehingga seharusnya terlalu kecil untuk dianggap pelanggaran.

De Minimis dan *Substansial Similarity* tentu erat kaitannya dalam Hak Cipta. Kedua prinsip ini digunakan dalam sebuah kasus pelanggaran yang memiliki kemiripan dalam sebuah karya cipta. Meskipun *De Minimis* sendiri tidak diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku maka Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.⁵ Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi.

Prinsip *Substantial Similarity* ini awalnya terdapat didalam penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penentuan pelanggaran Hak Ciptanya didasarkan pada ukuran kualitatif namun yang diambil bagian yang substansial, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%, kemudian penentuan pelanggaran menggunakan Prinsip ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini tentunya memicu terjadinya perbedaan pengaturan prinsip ini dalam undang-undang lama dan yang baru, yang dimana hal tersebut memberikan kemungkinan besar yaitu penerapan kedua prinsip tersebut dalam kasus nya menjadi berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip *De Minimis* dan Prinsip *Substantial Similarity* dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia”

⁵Pasal 124 UUHC No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Nama Peneliti dan Instansi Terkait	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Analisis Prinsip <i>Substansial Similarity</i> dalam menentukan Pelanggaran Hak Cipta atas Lagu	Muhammad Rizki Ramadhan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	1. Bagaimana analisis prinsip <i>substansial similarity</i> dalam menentukan pelanggaran hak cipta atas lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Apakah unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam menggugat sebuah permasalahan <i>substansial similarity</i> terhadap lagu?	Pada penelitian ini peneliti terdahulu membahas mengenai prinsip <i>substansial similarity</i> dalam menentukan pelanggaran Hak Cipta Atas lagu

C. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan prinsip *De Minimis* dan Prinsip *Substansial Similarity* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penerapan prinsip *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui perbandingan pengaturan Prinsip *De Minimis* dan Prinsip *Substansial Similarity* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk dapat mengetahui penerapan prinsip *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, juga dapat digunakan sebagai landasan untuk perkembangan khususnya ilmu hukum perdata terutama pada bidang

Hukum Kekayaan Intelektual. Dan diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip *de minimis* dan prinsip *substansial similarity*.

- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait prinsip *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* dalam menentukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan, untuk digunakan dalam kehidupan selanjutnya, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai prinsip *de minimis* dan *substansial similarity* dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dimana antar bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, dengan beberapa sub bab untuk menjelaskan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai pokok bahasan dari latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, perumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, serta membahas pula mengenai manfaat, tujuan, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan seputar pengertian lebih jauh mengenai prinsip de minimis dan prinsip *substansial similarity* dan kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual terlebih lagi dengan Hak Cipta.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan sebuah langkah sistematis yang ditempuh guna mencapai tujuan dari topik bahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif yang menggunakan beberapa pendekatan konsep diantaranya *statute approach*, *case approach*, *comparative approach* dan *historical approach*. Juga terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan penulis guna menganalisis bahan penelitian yang diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana perbandingan pengaturan prinsip *substansial similarity* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian juga membahas mengenai penerapan prinsip

de minimis dan prinsip *substansial similarity* dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan juga saran terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau dikenal juga dengan sebutan HAKI adalah terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata yakni Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan memiliki pengertian sebagai abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli ataupun dijual. Sedangkan Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan berdasarkan hasil produksi kecerdasan berpikir berupa seni, teknologi, sastra, karikatur, lagu, dan sebagainya. Berarti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki pengertian sebagai hak/wewenang untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh aturan atau hukum yang berlaku.¹

Hak kekayaan intelektual juga dapat dikatakan sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.²

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai

¹ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

² H. OK. Saidin 2, 2010, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Rajawali Press, hlm.9

intellectual property rights, makna dari istilah tersebut adalah, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual yaitu kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.³

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.⁴

Pada intinya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.⁵ Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan atas pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang

³ Munir Fuady, Loc.cit

⁴ Arthur Lewis, 2014, **Dasar-Dasar Hukum Bisnis**, Bandung: Nusa Media, hlm.335

⁵ Muhammad Firmansyah, 2008, **Tata Cara Mengurus HAKI**, Jakarta: Visi Media, hlm.7

telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi, sebab terdapat manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

OK. Saidin berpendapat dalam bukunya bahwa, hak kekayaan intelektual adalah bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori. Salah satunya ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPperdata. Untuk pasal ini, Mahadi berpendapat, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).⁶

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual yaitu terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Sebuah contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil

⁶ H. OK. Saidin 1, Op.cit, hlm.11

yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).⁷

Dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁸

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu:⁹

1. Hak Cipta dan
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:¹⁰

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri
4. Merek dagang dan nama dagang
5. Sumber asal atau sebutan asal

⁷ H. OK. Saidin 1, *Ibid*, hlm.13

⁸ **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Ditjen HKI, 2006, hlm. 3

⁹ H. OK. Saidin 2, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, 2015, Jakarta: Rajawali Press, hlm.16

¹⁰ *Ibid*. Hlm.17.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta

Hak cipta sebenarnya muncul dari kata *copyright* pada konsep *anglosaxon* (yang menganut sistem hukum *Common Law*). Sedangkan pada konsep hukum Eropa Kontinental (yang menganut sistem hukum *Civil Law*) termasuk yang awalnya dianut oleh Indonesia, hak cipta dikenal dengan sebutan *Author's Right* yang berarti hak pengarang.¹¹ Meskipun bila dilihat dari sisi sejarah awal perkembangan hak cipta, sejak masa Romawi sebenarnya sudah timbul kesadaran akan perlindungan hak seorang penulis karena pada zaman Romawi pun pernah ada tuduhan *plagiarist* oleh penyair Martial sebagai bentuk kecaman terhadap orang membacakan sajaknya didepan umum tanpa seizinnya.¹²

Hak cipta dikenal dengan istilah *copyright* karena hak cipta awal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.¹³ Istilah tersebut muncul sehubungan dengan penemuan mesin cetak (*moveable type*) untuk memperbanyak karya tulis oleh Guternberg tahun 1445, dan juga penemuan *printing express* sebagai pengembangan mesin cetak oleh William Caxton pada tahun 1476 yang mempermudah perbanyakan (*copy*) kemudian para pengusaha *publishing industry* memimnta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli reproduksi penerbitan,¹⁴ sehingga memunculkan *Statute of Mary of 1551*. Dalam *Statute of Mary* ini disebutkan bahwa pencetak merupakan pemegang monopoli hak cipta dan terdapat banyak pengekanan

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1993, hlm. 37.

¹² Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society**, Alumni, Bandung, hlm. 31-32.

¹³ Stephen M. Steward, *Intenational Copyright and Neighbouring Rights*, Butterworths, London, 1989, hlm. 7.

¹⁴ Agus Sardjono, **Hak Cipta dalam Desain Grafis**, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 15.

terhadap karya cipta yang melarang peredaran buku berisi ide-ide mengenai pemberontakan, penghinaan, pornografi dan sebagainya. Sehingga di Inggris pemakaian hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya.¹⁵

Meskipun pada saat itu di Inggris, pencipta diakui sebagai pemilik, namun karena kepentingan karya pencipta diketahui masyarakat, maka pencipta dianggap telah mengalihkan hak atas ciptaannya kepada perusahaan percetakan.¹⁶ Sehingga perlindungan hak cipta diberikan bukan kepada sang pencipta (*Author*), melainkan kepada pihak penerbit karena perlindungan hak ciptanya dipandang sebatas hak untuk memperbanyak karya tulis dan ditunjukan untuk melindungi kepentingan bisnis penerbit, dimana hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*Common Law*” yang mengacu pada segi ekonomi.

Pada abad ke-17 akhir pedagang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk buku sehingga Parlemen Inggris menerbitkan legislasi pertama di dunia yang membahas tentang hak kekayaan intelektual yakni Statuta Anne (*Statute of Anne*) yang diundangkan pada 1709 dan berkekuatan hukum sejak 10 April 1710. Statuta ini dikeluarkan oleh Ratu Anne yang pada saat itu menduduki tahta Monarkial Inggris Raya dari 6 Februari 1665 sampai 1 Agustus 1714. Statuta berjudul asli *An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors of Purchasers of Such Copies* ini pada pokoknya memberi dukungan pada

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. ,*Op. cit.*, hlm. 38.

¹⁶ Otto Hasibuan., *Op. cit.*, hlm. 33.

pendidikan dan kebebasan berekspresi. Dalam Statuta Anne, pengarang (*Author*) lebih diberikan hak monopoli atas reproduksi hasil karya mereka, disini juga ada kewajiban bagi pencetak (*printer*) untuk mendistribusikan salinan buku yang mereka cetak kepada berbagai perpustakaan di Inggris. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “*learned men to compase and write useful work*”.

Dalam bukunya pada tahun 1690 yang berjudul *Two Treatises on Civil Goverment* menyebutkan apabila pengarang mempunyai hak dasar (*Natural Right*) atas karya ciptanya. Peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum dan bisa dimanfaatkan dengan bebas oleh siapapun.

Pada perkembangan selanjutnya, perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk penciptanya (*Author*), tidak lagi hanya perlindungan bagi penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan dimana perlindungan tidak hanya menyangkut bidang buku saja, namun perlindungannya diperluas mencakup bidang lain seperti musik, drama, dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, karya cipta seperti fotografi, sinematografi, penyiaran, dan rekaman suara juga dilindungi hak cipta.¹⁷

Pergeseran tersebut terjadi pada saat dan setelah terjadinya Revolusi Prancis 1789 dimana negara Prancis dan negara Eropa lainnya sejak setelah Revolusi Prancis telah menghilangkan hak istimewa dan mengakui hak pencipta atau

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Op. cit.*, hlm. 38.

pengarang sebagai pangkal tolak dalam pengaturan hak cipta. Berdasarkan doktrin keadilan, Pencipta (*Author*) daripada penerbit seharusnya diberikan hak untuk memperbanyak dan hak untuk publikasi.¹⁸ Karenanya di negara Eropa dikenal dengan istilah-istilah, *Author's Right* (*droit d'auteur*, *auteursrecht*) bukan *Copyright*.¹⁹ Menurut konsep hak tersebut, hak pengarang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini dilandaskan prinsip hukum alam. Pencipta dianggap memiliki suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya.²⁰ Kenyataan adanya perbedaan pengertian hak yang ditunjukkan untuk melindungi si pencipta tersebut membawa pengaruh pada perkembangan hukumnya, dimana sekarang ini secara global kita mengenal ada tiga sistem hukum mengenai hak cipta, terdiri dari:

- a) Sistem *Common Law* yang lebih mengacu pada segi ekonomi sebagai dasar perlindungan hak cipta
- b) Sistem hukum sipil (*Civil Law*) yang mengacu pada prinsip "*natural justice*" (hak cipta pada seseorang ada, karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta, dan merupakan satu kesatuan dalam hidupnya).
- c) Sistem hukum sosialis, yang mana kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan perorangan, dan dijadikan dasar bagi pembentukan sistem hak ciptanya.²¹

Perkembangan di Belanda dengan Undang-Undang tahun 1817, hak cipta tetap berada pada penerbit, baru dengan undang-undang hak cipta tahun 1881 hak

¹⁸ Agus Sardjono, "*Author's Right is Not Only Copyright*", Jurnal Hukum Internasional, 2010, hlm. 201.

¹⁹ Otto Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 35-36.

²⁰ Stephen M. Steward, *Op. cit.*, hlm. 9.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Op. cit.*, hlm. 40.

khusus pencipta (*uitsluitendrecht van de maker*) sepanjang mengenai pengumuman dan perbanyakan memperoleh pengakuan formal dan materiil. Sampai pada akhirnya pada tahun 1886 muncul “*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*” (“Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra” atau “Konvensi Bern”) untuk perlindungan karya sastra dan seni, suatu pengaturan yang modern dibidang hak cipta. Kehendak untuk ikut serta dalam Konvensi Bern, merupakan dorongan bagi Belanda terciptanya Undang-Undang hak cipta tahun 1912 (*Auteurswet 1912*).

Konvensi Bern merupakan sebuah Konvensi dibidang hak cipta yang pertama kali mengatur tentang *copyright* antara negara negara berdaulat. Dalam Konvensi ini, *copyright* otomatis diberikan kepada pembuat karya cipta, kemudian pembuat karya cipta tidak harus mendaftarkan karyanya guna mendapatkan *copyright*. Setelah sebuah karya dicetak atau ditampilkan dalam satu media, pengarang mendapatkan hak eksklusif *copyright* secara otomatis terhadap karyanya dan juga terhadap karya *derivatif* atau turunannya (karya lain yang dibuat berdasarkan karya pertama), hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga habisnya waktu berlaku *copyright* tersebut.²²

Di Indonesia sendiri, perkembangan hak cipta tidak bisa lepas dari perkembangan hak cipta negara Belanda karena Indonesia dulu merupakan bagian dari pemerintahan Kolonial Belanda. Belanda yang termasuk menganut konsep *Author's Right* dalam undang-undangnya yaitu *Auteurswet 1912*, yang berdasarkan asas konkordansi juga memberlakukannya pada negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia (*Auteurswet 1912* diundangkan melalui Saatblad No. 600

²² Article 3 (1) (a) *The protection of this Convention shall apply to: authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, wheter published or not.*

Tahun 1912 tanggal 23 September 1912). Dimana pada masa itu *Author's Right* atau *Auteurs recht* memiliki arti sebagai hak pengarang. *Auteurs Recht* sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda.

Sampai pada akhirnya setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, istilah Hak Cipta muncul pada Tahun 1951 yang diusulkan oleh Prof. Moh. Syah, S. H. Saat kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap terlalu sempit pengertiannya. Para pelaku budaya masa itu risau dengan istilah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari *Auteurs Recht* yang terdapat dalam *Auteurswet* 1912. Menurut peserta kongres *Auteurs Recht* yang terdapat dalam *Auteurswet* tidak sematamata berhubungan dengan karang-mengarang dalam karya tulis (*literary works*), melainkan mencakup lingkup yang lebih luas, yaitu mencipta karya karya lainnya, seperti patung, musik dan karya kebudayaan yang lainnya. Oleh karena itu, istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari *Auteurs Recht* harus ganti menjadi istilah hak pencipta yang kemudia disingkat menjadi Hak Cipta.²³

Meskipun Indonesia telah merdeka sejak 1945 dan terjadi penggantian istilah dari Hak Pengarang menjadi Hak Cipta pada tahun 1951, Indonesia masih tetpa memakai undang-undang pemerintah kolonial Belanda untuk pengaturan hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912, yang dalam keberlakuannya dan penegakan hukumnya ternyata *Auteurswet* 1912 belum maksimal, hal ini tampak dari banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi karena sanksi didalamnya tergolong sangat ringan. Keadaan sanksi hukuman yang demikian mendorong para

²³ Ajip Rosidi, **Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam**, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 3.

pelanggar hukum untuk berbuat lebih berani lagi. Sanksi hukuman tersebut harus ditegaskan dengan hukuman penjara dan denda yang harus diperberat. Delik aduan perlu diubah menjadi delik biasa, karena dianggap tidak memberikan perlindungan dan jaminan kepada pencipta, karena banyak pencipta yang tidak ingin berurusan dengan penegak hukum, sehingga banyak pelanggaran yang tidak diadukan.²⁴ Hingga akhirnya pada Tahun 1958 Indonesia membuat rancangan Undang-Undang Hak Cipta karena *Auteurswet* 1912 dirasa tidak bersifat dinamis atau tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman sebab ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang seiring waktu berkembang.

Setelah kurang lebih 70 tahun *Auteurswet* 1912 berlaku akhirnya RUU Hak Cipta yang sah dirancang sejak tahun 1958 akhirnya berhasil menjadi UU melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 (selanjutnya disebut UUHC 1982) pada 12 April 1982, yang mana dengan berlakunya UUHC 1982, Pemerintah Indonesia mencabut keberlakuan *Auteurswet* 1912 di Indonesia *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912.²⁵ Terdapat dua faktor pertimbangan hukum yang menjadi dasar pencabutan *Auteurswet* 1912, yaitu²⁶:

- a) Dalam rangka pembangunan dibidang hukum sesuai dengan yang tertera didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1918), juga untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan, hasil kebudayaan, dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Hak Cipta**, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 194.

²⁵ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Bandung, 2015, hlm. 140.

²⁶ *Ibid*, hlm. 141.

Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hak Cipta.

- b) Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak lagi sejalan dan sepadan dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Dalam perkembangannya UUHC 1982 kemudian dianggap kurang memadai dalam melindungi perlindungan atas pencipta jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta diluar negri. Misalnya mengenai jangka waktu perlindungan, Konvensi Berne menentukan perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan menurut UUHC 1982 perlindungan hak cipta umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi pun terbatas karena hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Neighbouring Rights) tidak memperoleh perlindungan.²⁷

Dengan adanya perkembangan baru sejak diundangkannya UUHC 1982, ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan. Dari laporan masyarakat, terutama dari masyarakat yang bergabung dalam berbagai profesi yang erat hubungannya dengan hak cipta dibidang musik atau lagu, rekaman video serta program komputer, menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pembajakan ini semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat

²⁷ Asian Law Group, *Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, AusAid, 2002, hlm. 115.

merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas pencipta. Hal ini dikarenakan berbagai macam penyebab, misalnya rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai arti maupun fungsi hak cipta, serta adanya sikap keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah yaitu membajak hak cipta milik orang lain.²⁸

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:²⁹

- a) Kurangnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- b) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- c) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan karya cipta.

Selain sebab-sebab tersebut ternyata UUHC 1982 juga perlu penyempurnaan seperti mengenai permasalahan lingkup berlakunya undang-undang hak cipta khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi hak cipta asing dimana hak cipta asing hanya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk pertama kali diumumkan di Indonesia. Dalam hal ancaman sanksi pidana penjara kurungan dan ancaman denda perlu diperberat, dan perlunya perubahan sifat delik pidana aduan menjadi delik biasa.³⁰

Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas UUHC 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan

²⁸ Rooseno Harjowidigdo, **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 15.

²⁹ Suyud Margono, **Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual**, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 58.

³⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Op. cit.*, hlm. 15.

Rakyat (DPR), diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1987).³¹ Dalam UUHC 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantaranya perubahan mendasar yang terjadi didalamnya adalah masa berlakunya perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, kemudian karya-karya seperti rekaman video dikategorikan sebagai karya yang dilindungi.

Pada tahun 1997, undang-undang hak cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia untuk memenuhi kewajibannya pada persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs*) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994 dan berlakunya pada tanggal 1 Januari 1995 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dalam rangka menerapkan persetujuan TRIPs maka diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (UUHC 1997) (berlaku sejak Mei 1997). Dalam undang-undang tersebut, hak yang berkaitan dengan hak cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian undang-undang baru tersebut. Walaupun demikian banyak karya yang dianggap termasuk dalam hak-hak yang berkaitan Hak Cipta ternyata diikutsertakan dalam pasal umum mengenai kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi. Tolak ukur untuk mengukur terjadinya pelanggaran hak cipta diubah dari kuantitatif 10% (sepuluh persen) menjadi ukuran kualitatif yang

³¹ *Ibid*, hlm. 16.

sesuai dengan kebanyakan undang-undang di luar negeri. Revisi tahun 1997 juga menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif.

Walaupun perubahan pengaturan hak cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki guna memberi perlindungan terhadap karya-karya intelektual dibidang hak cipta, salah satunya upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibuatlah Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. Pengertian Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keanekaragaman seni dan budaya yang beranekaragam. Hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa serta agama yang secara keseluruhan merupakan potensial yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu termasuk salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat serta semestinya dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan tersebut bukan semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, melainkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya. Dengan demikian hak cipta dalam

hal ini sangat diperlukan sebab, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.³²

Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusatraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan sebagainya. Pada hakikatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.³³

Hak Cipta sendiri merupakan terjemahan dari *copyright* (yang berarti "hak salin"). *Copyright* sendiri muncul seiring dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan oleh Gutenberg ini, untuk membuat sebuah salinan dari sebuah karya tulisan, prosesnya membutuhkan tenaga serta biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya.³⁴

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan definisi Hak Cipta yaitu:³⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi tersebut berarti Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya, dan selain izinnya maka orang lain tidak berhak atasnya. Hak tersebut secara otomatis muncul setelah suatu karya

³² Sutedi Adrian, *Op. cit.*, hlm. 114.

³³ Otto Hasibuan., *Op. cit.*, hlm. 27.

³⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)**, hlm.21.

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

cipta dibuat. Pemegang karya cipta juga berhak atas hak ekonomi yang timbul dari karya ciptanya. Hal ini berarti, hak cipta sendiri memiliki sifat yang bertujuan untuk melindungi suatu ciptaan yang dibuat oleh musisi, penulis, programmer komputer, dan lain sebagainya dari perbuatan orang lain yang tanpa izin memperbanyak, meniru, atau mengumumkan sebuah ciptaan.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁶ Karenanya segala hasil karya cipta yang dihasilkan dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni maupun sastra dapat dilindungi sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Namun untuk dapat disebut sebagai ciptaan, hasil karya pencipta tersebut juga harus memenuhi syarat lainnya yaitu “originalitasnya”. Dengan demikian, suatu ciptaan adalah suatu hasil karya asli dari pencipta, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.

Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

*Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.*³⁷

Dilindungi hak cipta merupakan sebuah ekspresinya dari suatu ide, jadi bukan melindungi suatu ide, melainkan yang dilindungi hak cipta merupakan sudah dalam berupa sebuah ciptaan, bukan berupa sebuah gagasan.³⁸

³⁶ Ibid., Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁷ Tim Lindsley, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105

³⁸ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121.

Diantaranya keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta merupakan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan, diantaranya:

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematograph;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer*

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:³⁹

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

³⁹ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.⁴⁰

Jangka waktu perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 paling lama disebutkan adalah selama pencipta tersebut masih hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diumumkan. Jangka waktu paling pendek yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diumumkan.

Pendaftaran sebuah karya cipta juga bukan sekedar untuk memperoleh hak cipta. Dalam artian, seorang pencipta tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapat perlindungan, dengan syarat pencipta tersebut benar-benar sebagai pencipta dari karya tersebut. Pendaftaran sebenarnya bukan sebuah jaminan bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta terlepas si pencipta itu sendiri mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

Walaupun sebenarnya hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan sifatnya otomatis, namun dianjurkan kepada pencipta untuk mendaftarkannya, sebab dengan mendaftarkan ciptaannya, pencipta bisa mendapatkan Surat

⁴⁰ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendaftaran Ciptaan, yang dapat dijadikan pembelaan atau bukti di pengadilan jika suatu hari terjadi sengketa atau masalah terhadap ciptaannya.

Namun terdapat beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan, diantaranya:

- a. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- b. Ciptaan yang tidak orisinal
- c. Ciptaan yang bersifat abstrak
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang -Undang Hak Cipta.

3. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).⁴¹ Hak moral adalah hak yang berkaitan dengan perlindungan pencipta secara personal dan integritas dari ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hal-hal mengenai pengendalian secara komersil atau pengendalian terhadap eksploitasi ekonomi atas sebuah karya cipta.⁴² Hak pencipta ini dilindungi pula melalui The Universal Declaration Of Human Rights (1948)⁴³ dalam pasal 27:

- a) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of community to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁴² J. A. L. Sterling, *World Copyright Law*, Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm. 279.

⁴³ The United Nations, *Universal Declaration Of Human Rights*. 1948.

- b) *Everyone has the right to the protection of the moral and the material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dari ketentuan diatas, setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan moral maupun material atas hasil ciptaannya, dengan kata lain, setiap orang berhak dilindungi haknya secara moral maupun ekonomis atas hasil karyanya, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, maupun karya lain.

a. Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi.⁴⁴ Hak cipta sendiri erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Kepentingan-kepentingan tersebut, merupakan sebuah perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yang berarti bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu memiliki nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan bentuk kekayaan, walaupun tidak berwujud (*intangible*).

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan oleh pihak manapun dalam perindustrian atau perdagangan yang dibidang menguntungkan.⁴⁵

Hak ekonomi tersebut yakni hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas karya ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang tidak selalu sama, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁴⁴ Otto Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 71

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm. 19.

Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan. Bentuk perbanyakan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional ataupun modern.

- a) Penerjemahan ciptaan;
- b) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- c) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- d) Pertunjukan ciptaan;
- e) Pengumuman ciptaan;
- f) Komunikasi ciptaan; dan
- g) Penyewaan ciptaan.

b. Hak moral

Hak cipta sangat erat kaitannya dengan masalah moral, karena didalam hak cipta terdapat hak moral yang melekat selama waktu perlindungan hak cipta tersebut masih ada. Hak moral merupakan salah

satu hak-hak yang diakui oleh *Berne Convention*. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.⁴⁶

Salah satu contoh penggunaan hak moral seperti pencantuman nama pada sebuah ciptaan, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan pada pihak lain. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan ataupun wewenang tertentu kepada pemiliknya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Apabila hak cipta dialihkan pada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena sifatnya yang kekal atau pribadi. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta tersebut. Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan

Hak moral terdiri dari dua asas, yaitu:

⁴⁶ Otto Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 69.

- a. *Droit de paternite*, yakni pencipta memiliki hak atau kewenangan untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya,
- b. *Droit au respect*, memiliki arti yaitu seorang pencipta memiliki kewenangan untuk mengubah judul ataupun isi ciptaannya, dalam arti pencipta berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁴⁷

Sedangkan pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari sang pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri dan pihak lain yang telah menerima hak tersebut secara sah.⁴⁸

Dari pengertian diatas berarti dapat dikatakan bahwa pemegang hak cipta belum tentu seorang pencipta dari sebuah karya cipta. Karena dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki definisi yang berbeda.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.⁴⁹ Berarti dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian

⁴⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1.

kepada pemegang hak cipta. Peralihan hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, melainkan harus melalui cara tertulis atau dengan akta notaris. Peralihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Waqaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kepemilikan hak cipta tidak jarang lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Keadaan pencipta yang tidak dalam kondisi yang memungkinkan, atau tidak memiliki *skill* dalam mengeksploitasi karya ciptanya bisa menjadi salah satu penyebabnya.⁵⁰

Untuk menentukan pencipta dari sebuah karya ciptaan, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Apabila sebuah ciptaan terdiri atas bagian yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin serta mengawasi seluruh ciptaan itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah

⁵⁰ Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Press, Jakarta 2011, hlm. 98.

seseorang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya tersebut.⁵¹

Seseorang yang hanya merancang ide dengan seseorang yang mewujudkannya menjadi sebuah karya cipta, berbeda. Namun, lain halnya dengan sebuah ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan seseorang yang merancang, penciptanya merupakan yang merancang karya cipta tersebut.⁵² Ketentuan ini, tidak berbeda dengan prinsip *work made for hire*, yaitu mengerjakan dan secara fisik mewujudkan sebuah karya cipta, tidak dianggap sebagai pencipta melainkan hanya seorang pekerja.

Mengenai hak cipta dalam hubungan dinas, pasal 35 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang pengakuan pencipta, yaitu:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi Pemerintah.
- 2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila diperjanjikan dengan hal lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.⁵³ Apabila dalam hal badan hukum melakukan sebuah pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang berasal

⁵¹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵² *Ibid.*, Pasal 34.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 36.

dari badan hukum tersebut, maka dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, badan hukum lah yang dianggap sebagai pencipta.⁵⁴

1. Pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran dalam hak cipta terbagi menjadi 3, yaitu⁵⁵:

a. Pelanggaran langsung

Dapat berupa sebuah tindakan meniru karya asli meskipun hanya sebagian kecil dari karya asli yang digunakan, jika bagian yang substansial maka itu adalah sebuah pelanggaran, dalam hal ini pengadilan yang menetapkan.

b. Pelanggaran atas dasar kewenangan

Atau authorization infringement tidak mempermasalahkan disisi pelanggaran itu sendiri, melainkan menekankan pada sisi siapa yang bertanggungjawab. Hal ini merupakan kepastian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta bahwa mereka akan mendapat kelayakan sebuah kompensasi. bentuk pelanggaran ini dapat membebankan tanggung gugat pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran hak cipta tersebut terjadi.

c. Pelanggaran tidak langsung

Tolak ukur yang digunakan dalam pelanggaran ini adalah bahwa si pelanggar mengetahui bahwa mereka melakukan sebuah pelanggaran.

Pelanggaran dalam hak cipta umumnya terjadi apabila bagian dari karya cipta tersebut digunakan tanpa izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 37.

⁵⁵ Rahmi Janed, **Hukum Hak Cipta**, Citra Aditya, Jakarta, 2014, hlm. 215-220.

Pelanggaran dalam hak cipta dapat dikatakan apabila terjadi kesamaan atau kemiripan antara kedua karya cipta yang bersangkutan. Namun, tentunya seorang penggugat harus bisa membuktikan bahwa si tergugat memang bersalah karena telah melanggar hak cipta, yakni memiliki kesamaan dengan karya ciptaannya. Dalam hal menentukan sebuah pembuktian, berdasarkan pasal 1865 buku ke empat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pihak penggugat harus dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa tergugat memang bersalah, dalam hal ini berarti penggugat harus memiliki cukup bukti agar dirinya memenangkan persengketaan dan tergugat bisa dikalahkan dalam hal ini.

C. Tinjauan tentang Prinsip *Substansial Similarity*

Pelanggaran dalam hak cipta tentu erat kaitannya dengan Prinsip *Substansial Similarity*. *Substansial Similarity* dalam hak cipta itu sendiri sering diartikan sebagai “persamaan pada pokoknya”, persamaan yang dimaksud adalah yang bersifat substansial pada sebuah karya ciptaan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 44 ayat (1) yaitu:

“yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri ciptaan”

Hal ini berarti prinsip *Substansial Similarity* menurut pasal diatas adalah apabila sebuah karya cipta yang baru dibuat memiliki kesamaan yang

substansial atau yang khas dari sebuah karya yang lebih dulu ada, maka dapat dikatakan melanggar hak cipta.

Pengertian lain mengenai *Substansial Similarity* seperti yang dijelaskan oleh *Black Law Dictionary*, yaitu:⁵⁶

A strong resemblance between a copyrighted work and a alleged infringement, thereby creating an inference of unauthorized copying. The standard for substansial similarity is whether an ordinary person would conclude the alleged infringement has appropriated nontrivial amounts of the copyrighted work's expression.

Pada penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa *Substansial Similarity* adalah karya cipta dan pelanggaran hak cipta memiliki keterkaitan yang erat. Dan unsur utama yang digunakan dalam prinsip ini adalah berupa opini atau pandangan orang-orang untuk menilai apakah terdapat kesamaan yang substansial atau tidak dalam sebuah karya cipta.

Sedangkan definisi *Substansial Similarity* menurut Mark. V. Patridge yakni:

The term "substantial similarity" causes confusion in the copyright infringement analysis because the same term has different meanings at two different points in the infringement analysis. To prove infringement, the plaintiff must show that the defendant copied elements of a work that are original.

Prinsip *Substansial Similarity* akan menimbulkan kebingungan bagi seseorang yang akan mengkaji pelanggaran terhadap sebuah karya cipta, sebab adanya dua objek ciptaan yang memiliki kemiripan, sehingga untuk menunjukan sebuah pelanggaran penggugat harus membuktikan kepada penggugat bahwa karya ciptaannya lah yang asli.

⁵⁶ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota, 2009, Ninth Edition, hlm. 253.

D. Tinjauan tentang Prinsip *De Minimis*

Doktrin "*De Minimis non curat lex*" atau yang lebih dikenal dalam terjemahan dalam bahasa Inggris sebagai "*the law doesn't concern itself with trifles*", atau biasa disingkat *De Minimis*, terdapat juga definisi lain yang menyebutkan *de minimis* sebagai "*the law don't regard trifles*", dan "*the law cares not for small things*". Meskipun terdapat beberapa terjemahan dari doktrin *de minimis* yang akhirnya menimbulkan perdebatan definisi mana yang paling tepat, dapat diartikan bahwa arti dasar dari doktrin *de minimis* tersebut sudah jelas yaitu berupa sebuah pandangan dimana suatu perkara seharusnya tidak menjadi kasus persidangan di pengadilan karena dianggap terlalu kecil atau remeh, atau bisa dikatakan hukum tidak mengadili kasus yang dianggap spele.⁵⁷

Dengan kata lain dengan prinsip hukum ini sebuah pelanggaran hukum yang dianggap spele dapat diabaikan. Dalam prinsip ini, meskipun sudah jelas terdapat pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran atau akibat dari pelanggaran tersebut sangat spele, maka pengadilan dapat mengabaikannya dengan tidak memeriksa kasus tersebut karena dianggap spele dan membuang-buang waktu dan biaya operasional pengadilan.⁵⁸

⁵⁷ Andrew Inest, "*A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*", Berkeley Technology Law Journal Vol. 21 (2006). Hlm. 947.

⁵⁸ Julie D. Cromer, *Op. cit.*, hlm. 262.

1. Sejarah De Minimis

Secara historis tidak banyak informasi yang menjelaskan bagaimana prinsip hukum *de minimis* ini bisa muncul menjadi sebuah doktrin hukum, walaupun *de minimis* memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah hukum.⁵⁹

Doktrin ini pertama kali mulai dikenal didalam hukum perdata pada sekitar awal abad ke-15 (lima belas) di Inggris, walaupun sebenarnya doktrin ini juga sudah dikenal sebelumnya dan telah digunakan dalam berbagai kasus namun tidak menggunakan istilah *de minimis*⁶⁰ melainkan dikenal dengan beberapa istilah lain seperti “*minimal*”, “*modest*”, dan “*miniscule*”.⁶¹

Munculnya penggunaan doktrin ini pada pengadilan di Inggris dikarenakan pada saat itu Pengadilan di Inggris sedikit tidak sabar terhadap kasus-kasus yang dianggap spele dan membuang-buang waktu dan sumber daya pengadilan yang terbatas. Sehingga akhirnya pada abad ke-16 (enam belas) pengadilan Inggris menggunakan doktrin *De Minimis* ini diberbagai situasi dan kasus.⁶²

Sistem pengadilan Inggris sudah sejak lama menggunakan semacam tes untuk menentukan apakah sebuah gugatan terlalu spele dan tidak penting untuk diperkarakan dalam pengadilan. Pada akhirnya pada aawal tahun 1650 pengadilan Inggris dan para advokat menggunakan doktrin *De Minimis* untuk mencegah masuknya sebuah gugatan kedalam pengadilan dimana akibat dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Andrew Inest, *Op. Cit.*, hlm. 948. Contohnya pada abad ke 14(empat belas) Pengadilan Inggris menolak untuk mengadili kasus pemindahan 5 (lima) pohon dikarenakan terlalu spele dan tidak terlalu penting untuk diadili dalam pengadilan “*too trifling for us to adjudge it waste*”

⁶¹ Jeffrey Brown, “*How Much Is Too Much? The Application Of The De Minimis Doctrine To The Fourth Amandment*”, *Mississippi Law Journal* Vol. 82 (2012), hlm. 1099.

⁶² Julie D. Cromer, *Op. Cit.*, hlm. 263.

kerugian terhadap korban dianggap terlalu kecil. Sehingga dapat dikatakan doktrin *De Minimis* dimaksudkan agar sumber daya pengadilan digunakan hanya terhadap kasus yang akibat dan kerugian yang ditimbulkan lebih besar dan lebih penting untuk diadili.⁶³

Pada awal tahun 1796 *United States Of America*, pertama kali mengadopsi doktrin *De Minimis* ini kedalam sistem hukumnya saat *Justice Paterson* (Hakim Agung) pertama kali memperkenalkan doktrin ini pada sistem hukum Amerika, dalam *concurring opinion*⁶⁴ yang berisi:

*When this law was passed, the depreciation, i believe was little felt, and not at all acknowledged. De Minimis non curat lex, is an old law maxim. I may parody it on this occasion, by saying De Minimis non curat libertas. When the life, liberty, property, everything dear to man was at stake, few could have coldness of heart enough to watch the then scarcely perceptible gradation in the value of money.*⁶⁵

Yang kemudian doktrin ini digunakan oleh pengadilan dalam berbagai kasus untuk menolak mengadili perkara yang dianggap tidak terlalu penting atau spele, sehingga tidak membutuhkan suatu putusan pengadilan.

2. Penggunaan De Minimis

Pada dasarnya doktrin *De Minimis* dapat digunakan pada berbagai macam kasus yang biasanya melibatkan angka, waktu, persentase, manusia, atau uang. Namun tidak menutup kemungkinan hal-hal lain diluar hal tersebut yang telah disebutkan, karena pada dasarnya doktrin *De Minimis* dapat digunakan pada semua pelanggaran terhadap hak cipta.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Concurring Opinion*, terjadi ketika Majelis Hakim telah mencapai kata mufakat bulat dalam memberikan putusan namun terdapat perbedaan alasan dalam memberikan pertimbangan dalam keputusan tersebut.

⁶⁵ Julie D. Cromer, *Op. cit.*, hlm. 263.

⁶⁶ Jeffrey Brown, *Op. cit.*, hlm. 1100.

3. Faktor-faktor *De Minimis*

Untuk faktor-faktor dalam mempertimbangkannya kita dapat mengembangkannya dari tulisan Max Veech dan Charles Moon⁶⁷ yang membahas seputar faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan pengadilan dalam menerapkan doktrin *De Minimis*, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari:

a. Ukuran dan Jenis Kerugian

Faktor pertama dan yang terpenting yaitu besarnya kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang biasanya diukur menggunakan persentase, ataupun jumlah uang dari kerugian tersebut. Dimana faktor ini digunakan untuk menghentikan tuntutan-tuntutan mana yang kerugiannya relatif kecil.

Penggunaan ukuran jumlah uang dapat kita lihat dalam kasus *Schlichtman v. N.J Highway Auth, Superior Court of New Jersey* tahun 1990, yang mana pengadilan menghentikan tuntutan yang diajukan pengendara mobil Paul Schlichtman dalam menuntut pengembalian uang sebesar \$20.35 yang dibayarkannya untuk pembelian token tol. Meskipun demikian kecilnya kerugian tidak selalu menyebabkan sebuah kasus dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan *De Minimis*, misalnya kasus *Repp v. Webber, Southern District of Newyork* pada tahun 1996, yang mana pembelaan *de minimis* ditolak pada kasus yang melanggar hukum sebesar \$75.87. begitu pula terhadap kasus pencurian permen seharga

⁶⁷ Max L. Veech dan Charles Moon, "*De Minimis Non Curat Lex*", Michigan Law Review, Vol.45, No.5 (1947), hlm. 544.

\$0.35 dalam kasus *Commonwealth v. Moses*, *Superior Court of Pennsylvania* pada tahun 1986.

Kemudian apakah *De minimis* hanya dapat digunakan pada kasus yang jumlah kerugian uangnya sedikit? Dalam kasus-kasus industrial Ass'n of San Fransisco v. United States, pada tahun 1925 Supreme Court menyatakan bahwa sengketa atas beberapa ribu dolar adalah *de minimis* dibandingkan dengan total aktifitas ekonomi yang lebih dari \$100.000.000 (seratus juta dolar). Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan doktrin *De Minimis* pada beberapa kasus tidak dapat hanyamelihat jumlah uang dari kerugian itu saja namun juga perlu total dari nilai keseluruhan kasus tersebut lalu dibandingkan dengan kerugiannya, atau dengan kata lain menggunakan persentase.

Penggunaan persentase dalam menentukan ukuran kerugian dalam doktrin *De Minimis* adalah hal yang penting dikarenakan tidak semua ukuran yang menjadi objek sengketa adalah uang dan berhubungan dengan angka, misalnya pada kasus *McAndrews v. Thatcher* pada tahun 1865, kerusakan pada 1/144 atau 0.694% bagian dari kapal adalah *De Minimis*. Lalu apakah persentase yang kecil lantas dapat dikaitkan dengan *De Minimis*? Pada kasus *Wyoming v. Oklahoma* pada tahun 1992 yang mana kerugian pajak sebesar \$500.000 adalah bukan *De Minimis* walaupun jumlah tersebut tidak lebih dari 1% dari total keseluruhan penerimaan pajak Wyoming.

Sehingga tidak mungkin hukum dapat menetapkan patokan besar kecilnya kerugian yang termasuk kedalam *De Minimis* atau tidak secara

absolut, karena setiap kasus membutuhkan penilaian masing-masing dilihat dari keadaan dan kasus tersebut.⁶⁸

b. Biaya beracara

Faktor ini digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus pantas untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah faktor ini tidak hanya sebatas pada biaya beracara yang secara langsung dikeluarkan oleh pengadilan saja, namun juga biaya lain yang ditimbulkan karena memakai waktu pengadilan yang sibuk. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan utama doktrin *De Minimis* adalah untuk membantu mencegah keadilan yang tertunda.

Meskipun faktor biaya beracara penting namun faktor ini saja tidak dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diberhentikan atas alasan *De Minimis* karena bila tidak maka doktrin tersebut dapat digunakan untuk memberhentikan terhadap hampir semua kasus. Sehingga faktor biaya beracara ini perlu dihubungkan dengan faktor sebelumnya yakni ukuran dan jenis kerugian yang terjadi.

c. Tujuan dari peraturan yang bersangkutan

Faktor ketiga adalah apakah penggunaan doktrin *de minimis* akan bertentangan dengan tujuan utama peraturan yang bersangkutan dibuat

d. Efek terhadap hak hukum pihak ketiga

Pada dasarnya faktor ini adalah pembenaran dari penolakan terhadap penggunaan doktrin *De Minimis* untuk menghentikan sengketa. Ketika kasus pengadilan dapat memutuskan menolak pembelaan yang

⁶⁸ Jeffrey Brown, *Op. cit.*, hlm. 1107.

menggunakan doktrin *De Minimis* yang menyatakan bahwa hak hukum dari pihak ketiga yang dimaksud sangatlah kecil dan dapat dikategorikan kedalam *De Minimis*. Misalnya, ketika salah satu pemegang saham suatu perusahaan melakukan penuntutan atas nama perusahaan tersebut pengadilan tidak menolak gugatan tersebut atas dasar *De Minimis* karena pemegang saham tersebut hanya memiliki sedikit saham di perusahaan tersebut. Serta dalam gugatan *class action*, doktrin ini juga biasanya tidak digunakan dalam hal untuk menghentikan penuntutan meskipun kepentingan dari kepentingan gugatan tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan keseluruhan dari kasus yang bersangkutan.

e. Niat dari pelaku

Penggunaan doktrin ini pada dasarnya didalam sebuah perkara tidak terlepas dari faktor niat si pelaku, baik sengaja ataupun tidak, baik dengan niat yang baik ataupun buruk. Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau seseorang yang dituduh melakukan kesalahan memang didasari oleh niat buruk, maka pembelaan menggunakan doktrin ini dalam kasusnya tidak lagi dapat digunakan. Karena sering kali pemikiran masyarakat berasal dari sebuah prinsip bahwa ketika kesalahan yang dilakukan memang karena kesengajaan pelaku maka tentu sudah jelas betapa kecilnya kerugian yang ditimbulkan.

4. Teori Penggunaan Doktrin *De Minimis*

Setelah mengetahui beberapa faktor diatas, maka kita dapat menentukan parameter penggunaan doktrin *De Minimis*, sehingga kita dapat menentukan

apakah suatu hal dapat dikatakan *De Minimis* atau tidak. Namun, hanya mengetahui faktor-faktor tersebut diatas saja tentu tidak dapat menyelesaikan masalah dalam memahami penggunaan teori ini, perlu juga memahami penggunaan teori *De Minimis* ini, karena penjelasan faktor-faktor diatas cenderung bersifat deskriptif daripada perspektif.⁶⁹

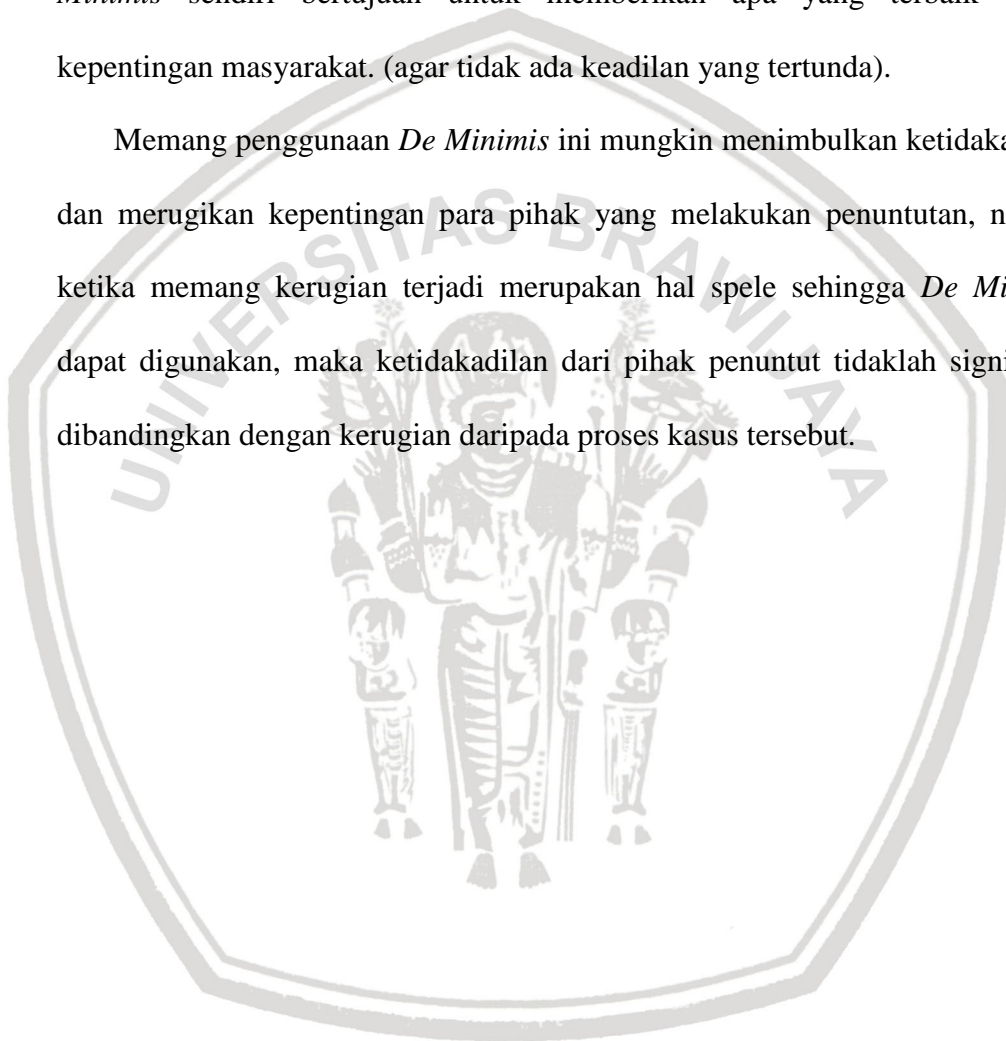
Pemahaman mengenai penggunaan teori *De Minimis* ini bertujuan agar kita dapat menentukan dan mengetahui kapankah penggunaan doktrin ini dapat dibenarkan dimata hukum. Untuk menjawabnya dapat menggunakan dua tahap analisa. Pertama, dengan diberikannya kasus diskresi kepada pengadilan untuk menentukan penggunaan doktrin *De Minimis*, pengadilan perlu membatasi penggunaan doktrin ini hanya kepada kasus-kasus yang tingkat favoritism dan inkosinsistensinya rendah agar masyarakat tidak memandang penggunaan doktrin ini, sebagai tindakan tebang pilih, misalnya pada kasus-kasus pencurian ringan seperti pada kasus Nenek Marsina pencuri buah kakao. Serta menggunakan doktrin ini hanya pada kasus yang pelanggaran atau kerugian yang telah terjadi, baik terhadap negara atau subjek hukum lainnya tidak signifikan, sehingga penggunaan doktrin ini dalam sebuah perkara tidak menimbulkan ketidakadilan yang signifikan karena kerugian dan pelanggaran yang terjadi sangatlah spele. Kemudian dalam menentukan sebuah pelanggaran atau kerugian adalah hal yang remeh atau spele, pengadilan hanya perlu mempertimbangkan kerugian yang memang ingin dicegah oleh peraturan yang bersangkutan saja. Kerugian lainnya yang tidak berhubungan dengan kerugian ingin dicegah oleh peraturan yang bersangkutan tidak perlu masuk dalam

⁶⁹ Max L. Veech dan Charles Moon, *Op. cit.*, hlm. 560.

analisa penggunaan *De Minimis*, misalnya kerugian immaterial, atau kerugian harga diri pada sang korban.

Kemudian analisa kedua dalam penggunaan teori *De Minimis* ini adalah menganalisa apakah kerugian sosial pengadilan dalam mengadili kasus yang dianggap *De Minimis* ini melebihi keuntungan sosial, karean pada dasarnya *De Minimis* sendiri bertujuan untuk memberikan apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. (agar tidak ada keadilan yang tertunda).

Memang penggunaan *De Minimis* ini mungkin menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan para pihak yang melakukan penuntutan, namun ketika memang kerugian terjadi merupakan hal spele sehingga *De Minimis* dapat digunakan, maka ketidakadilan dari pihak penuntut tidaklah signifikan dibandingkan dengan kerugian daripada proses kasus tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau sekunder.¹ Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah agar konsepsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau konsepsi dalam norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas menjadi lebih dipahami.² Dan tujuan lain dari penelitian yuridis normatif adalah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan suatu keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jadi, tujuan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah karena penulis ingin mengetahui dan menganalisa perihal bagaimana perbandingan pengaturan prinsip *De Minimis* dan *Prinsip Substantial Similarity* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta bagaimana penerapan prinsip *de minimis* dan prinsip *substantial similarity* dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 11.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³ Yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi terkait, serta interpretasi hukum yang merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tidak terdapat didalam undang-undang.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini, bisa berupa kasus yang terdapat di dalam ataupun di luar negeri.
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum.⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan suatu penelitian hukum tentunya membutuhkan bahan-bahan hukum sebagai penunjang penelitian tersebut. Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan Hak Cipta, antara lain:

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 97.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.131.

- 1) TRIPs;
- 2) *WIPO Copyright Treaty*;
- 3) *United State Copyright Act 1976*;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), merupakan bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer beserta implementasinya, dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

- 1) Buku literatur;
- 2) Jurnal;
- 3) Hasil-hasil dari penulisan ilmiah;
- 4) Penelusuran internet

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau *tertiary sources*, merupakan bahan yang dapat melengkapi kedua bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam metode penelusuran bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dimana bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian diidentifikasi, dianalisis, dan diklasifikasikan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Penelusuran ketiga bahan hukum tersebut diperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, koleksi pribadi, penelusuran internet, kemudian terdapat juga beberapa kamus seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, dan kamus lain yang dibutuhkan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁵

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya.

2. Penafsiran Sistematis

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 112.

Penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

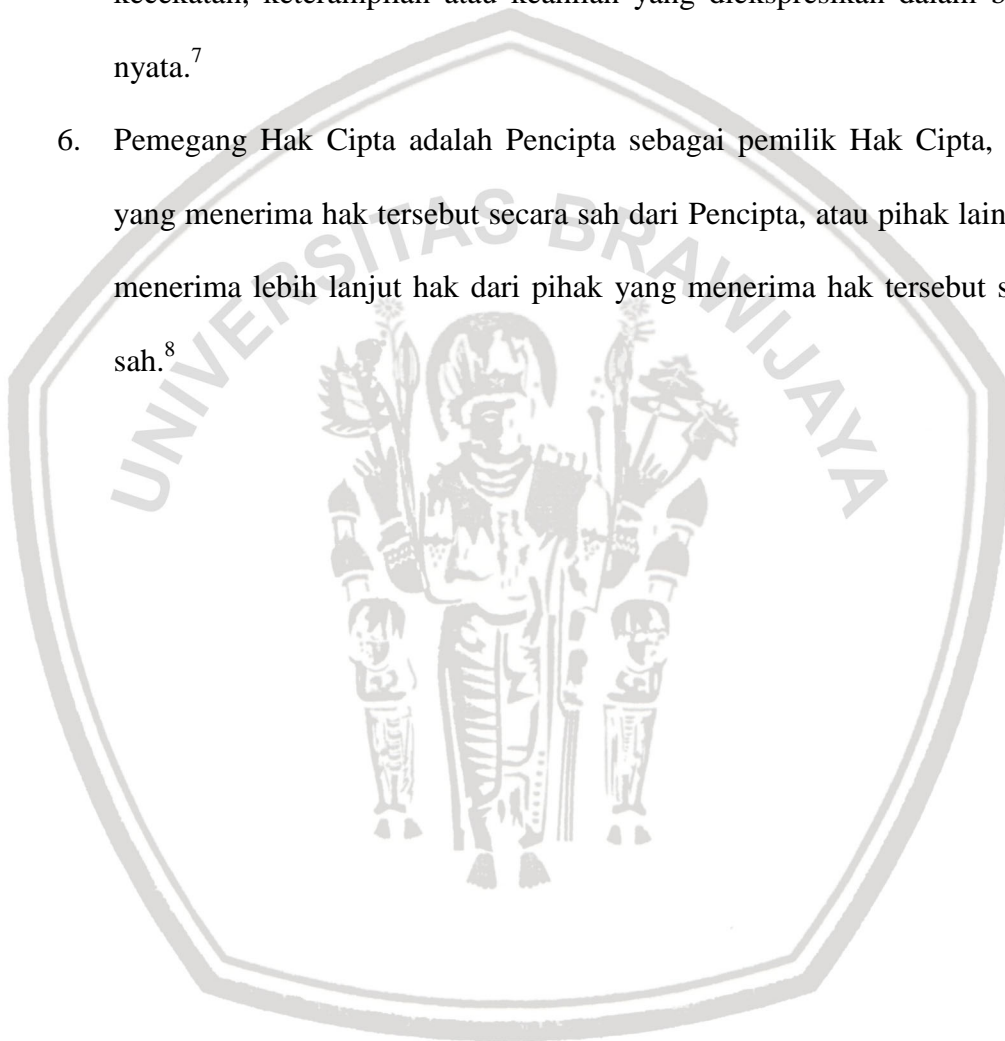
F. Definisi Konseptual

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuknya tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶
2. *Substantial similarity* pada hukum merk istilah ini memiliki pengertian sebagai “persamaan pada pokoknya”
3. *De Minimis* adalah sebuah doktrin yang tidak hanya terbatas dalam hukum hak cipta saja, namun juga berlaku dibanyak kasus lain yang berhubungan dengan hukum. *De minimis* sendiri berasal dari kata “*de minimis no cutar lex*” yang dalam bahasa inggris dapat diterjemahkan menjadi “*the law doesn't concern itself with trifles*” dapat disimpulkan bahwa hukum tidak akan memperdulikan hal-hal kecil. Gagasan ini muncul saat ada pelanggaran hukum namun sangat membuang waktu dan tenaga bagi pengadilan untuk mempermasalahkannya.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁷
6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁸



⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Substansial Similarity dan De Minimis dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dan Undang Undang Hak Cipta 2014

1. Gambaran Umum Prinsip *Substansial Similarity*

Substansial similarity yang dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian “persamaan pada pokoknya” merupakan sebuah unsur yang diperlukan untuk menunjukkan kesamaan atau kemiripan antara sebuah ciptaan yang ditiru, dari kesamaan atau kemiripan tersebut berkaitan erat dengan sebuah pelanggaran hak cipta yang didalamnya terdapat unsur unsur *substansial similarity* yang bersifat membuktikan (*probative of copying*). *Substansial similarity* atau persamaan pada pokoknya dalam pengertiannya pada hukum hak cipta belum memiliki pengertian yang pasti. Mark Halloran¹ dalam bukunya yang berjudul *The Musician's Business and Legal Guide* berpendapat bahwa:

Clearly, substantially similarity means something less than identical and something more than a little bit alike... so similar that an ordinary listener to music would believe that there was a strong possibility that one song, or at least an important part of it, was copied from the other...”

Berdasarkan kutipan diatas bahwa *substansial similarity* merupakan sesuatu yang kurang identik namun lebih dari mirip. *Substansial similarity* erat kaitannya dengan persamaan antara ciptaan milik tergugat dengan ciptaan penggugat, karena pada persamaan tersebut dapat membuktikan bahwa tergugat telah meniru ciptaan penggugat, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tindakan peniruan atas

¹ Mark Halloran, *The Musician's Business and Legal Guide*, ed. Engelwoods Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1991, hlm. 68.

ciptaan penggugat.² *Substansial Similarity* dalam hak cipta menurut *Black Law Dictionary* adalah:

A strong resemblance between a copyrighted work and an alleged infringement, there by creating an inference of unauthorized copying. The standard for substansial similarity is wheter an ordinary person would conclude that the alleged infringement has appropriated nontrivial amounts of the copyrighted work's expressions.

Bahwa kemiripan yang kuat antara karya yang memiliki hak cipta dan diduga melanggar, sehingga menciptakan suatu kesimpulan penyalinan yang tidak sah. Standar untuk persamaan pada pokoknya yaitu apakah orang biasa akan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran telah disesuaikan jumlah yang tidak biasa dari ekspresi atau karya yang dilindungi hak cipta karya ini, dengan kata lain *substansial similarity* pada hak cipta unsur yang diutamakan adalah pandangan publik selaku awam digunakan untuk menyimpulkan sebuah pelanggaran dari persamaan atau kemiripan tersebut terjadi atau tidak.

Dalam menilai *substansial similarity* menurut Shyamkrishna Balganes, Irina D. Manta, dan Tess Wilkinson Ryan³ dalam jurnalnya menyatakan:

By the time a court reaches the question of substansial similarity, the jury has heard and analyzed a good deal of evidence about: the plaintiff, the defendant, the creativity involved, the process though which the work was created, the reasons for which the work was produced, the defendant's own creative efforts behavior, and, on occasion, the market effects of defendant's copying.

Menurut pendapat diatas sebuah kasus pelanggaran hak cipta diperiksa pengadilan menyangkut pertanyaan ada atau tidak substansial similarity pengadilan telah menganalisa dan mendengar dari beberapa bukti yang disampaikan atau beberapa bukti yang terkait mengenai: keterangan yang

² Hendra Tanu Atmaja, **Hak Cipta Musik atau Lagu**, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 116

³ Syamkrishna Balganes (Eds.), **Judging Similarity**, University of Pennsylvania Law School, Penn Law: Legal Scholarship Repository, Pennsylvania, 2014. hlm. 269.

disampaikan penggugat, keterangan yang disampaikan tergugat ada atau tidaknya proses kreativitas yang terlibat dalam pembuatan ciptaan, proses yang ditempuh dalam membuat sebuah ciptaan itu ada, alasan ciptaan itu diproduksi, ada atau tidaknya usaha kreatif tergugat, kebiasaan penggugat dan dalam keadaan mana ciptaan yang meniru itu bisa mempengaruhi pasar. Jadi tidak semata-mata menilai sebuah kesamaan atau kemiripan harus mempertimbangkan banyak hal yang menyangkut bagaimana ciptaan itu dibuat.

Menurut Mark V.B Patridge⁴ didalam jurnalnya menjelaskan mengenai *substansial similarity* bahwa:

The term “substansial similarity” causes confusion in the copyright infringement analysis because the same term has different meanings at two different points in the infringement analysis. To prove infringement, the plaintiff must show that the defendant copied elements of a work that are original.

Didalam penggunaan prinsip *substansial similarity* akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang akan menganalisa pelanggaran hak cipta, hal ini timbul karena adanya perbedaan pengertian melihat dua objek ciptaan yang sama, untuk menunjukan sebuah pelanggaran penggugat harus menunjukan kepada tergugat bahwa karya ciptaan sipenggugat adalah yang asli.

Lebih jelasnya lagi dijelaskan mengenai pembuktian *substansial similarity* yaitu:

...test for infringement involves two separate inquiries. First, did the defendant actually copy the plaintiff's work. Second, were the copied elemements protected expression and sufficiently important to be actionable. In other words, did the copying constitute infringement. The term “substansial similarity” is used by the courts for both inquiries, but has a different meaning in each instance.

⁴ Mark. V.B. Patridge, *Understanding Substantial Similarity and Scope of Protection* (online), Mark Patridge Journal law, <http://www.pattishall.com/pdf/UnderstandingSubstantailSim.pdf> (20 April 2018).

Berdasarkan pengertian diatas lebih menjelaskan bahwa dalam membuktikan pelanggaran melibatkan dua pembuktian yang terpisah, yang pertama adalah kemungkinan tergugat meniru ciptaan penggugat dan yang kedua adalah hal yang ditiru tersebut ada upaya untuk dilindungi atau hal tersebut penting untuk dilindungi, dengan kata lain telah dilindungi secara hukum. Penggunaan kata *substantial similarity* dalam pengadilan digunakan penggugat maupun tergugat namun memiliki perbedaan sudut pandang dalam melihat persamaan pada bagian pokok atau *substantial similarity* tersebut.

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta merupakan ciptaan-ciptaan yang kaitannya erat dan masuk dalam ruang lingkup hak cipta serta memenuhi kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta unsur prinsip *substantial similarity* terdapat penjelasan pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang pelaiing penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.”

Prinsip *Substantial Similarity* didalam pasal ini menilai sebuah pelanggaran dengan sebagian yang substansial atau dengan kata lain bagian yang paling khas dan menjadi ciri dari ciptaan, dengan begitu jika terjadi kasus mengenai kesamaan pada karya cipta yang dianggap meniru atau menyalin, hakim dalam memutus perkara tidak mengacu pada pasal 44 saja. Tetapi dalam melihat sebuah ciptaan yang memiliki unsur dibuktikan dengan menggunakan prinsip yang ada didalam *substantial similarity* yaitu dengan *substantial similarity test*, yakni test untuk membuktikan persamaan pada pokoknya pada kedua ciptaan yang diduga melakukan tindakan meniru atau menyalin,serta diperlukan pengetahuan hakim

mengenai unsur-unsur yang lebih jelas dan mendalam mengenai perumusan *substantial similarity* dalam membandingkan dua buah ciptaan yang dianggap meniru.

Hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.

2. Gambaran Umum Prinsip *De Minimis*

De minimis non curat lex atau yang biasa disebut *de minimis* merupakan sebuah prinsip dalam lingkup hak cipta yang secara harfiah memiliki pengertian bahwa hukum tidak akan menindak lanjuti sebuah kasus yang dianggap terlalu kecil, atau dalam artian terlalu spele untuk dibawa ke ranah pengadilan.

Dalam hal ini, penggugat harus membuktikan kepemilikan hak ciptanya dan pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut, seperti penggandaan tanpa hak yang

⁵ Tim Lindsey (ed) dalam buku Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar hlm. 122

dilakukan oleh tergugat. Karena pada umumnya penggugat tidak bisa membuktikan perbuatan penggandaan secara aktual itu sendiri, penggandaan bisa dibuktikan secara inferensial dengan menunjukkan bahwa tergugat memiliki akses terhadap Ciptaan yang dilindungi dan Ciptaan milik tergugat memiliki kesamaan substansial dengan Ciptaan yang dilindungi.⁶

Apabila tergugat perkara ingin menggunakan prinsip *de minimis* untuk pembelannya, maka ia harus berargumen bahwa perbuatannya tidak menghasilkan keuntungan ekonomi atau memang menghasilkan tapi dalam jumlah yang sangat kecil, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan kepada pemegang hak cipta juga tidak ada atau sangat kecil.

3. *Substantial Similarity* dan *De Minimis* di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 dan Undang Undang Hak Cipta Tahun 2014

Pelanggaran dengan peniruan ciptaan lain merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta yang sudah sejak lama terjadi. Unsur mutlak dari sebuah ciptaan adalah orisinalitas atau keaslian. Sebuah karya yang merupakan hasil peniruan atas ciptaan yang sudah ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hak cipta. Akan tetapi, untuk membuktikan pelaku yang meniru ciptaan yang sudah ada dianggap melanggar hak cipta, hal ini masih memerlukan penjelasan.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Indonesia aturan atau norma keaslian ini diatur pada pasal 1 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 2:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁶ Perelman, *Proving Copyright Infringement of Computer Software: An Analytical Framework*, hlm. 940-941.

Pasal 1 Ayat 3:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 aturan

atau norma keaslian ini diatur pada pasal 1 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pasal 1 ayat 3

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dari kutipan diatas isi dari ayat ke 2 dan 3 di dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, pada pasal 1 ayat 2 perbedaan dengan undang-undang yang lama yaitu kata-kata yang digunakan lebih diperluas dan singkat namun tetap memiliki pengertian yang sama, lalu di dalam undang-undang yang lama isi pasal 1 ayat 3 lebih menekankan keaslian dari ciptaan dan belum banyak variabel ciptaan yang dilindungi, di dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru kata-kata keaslian tidak dicantumkan karena memang sebuah ciptaan itu memang harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan yang bersifat khas dan pribadi seperti yang sudah di jelaskan pada pasal 1 ayat 2 dan bukan merupakan tiruan karya pihak lain dan diperjelas bahwa ciptaan itu harus diekspresikan ke dalam bentuk nyata karena hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta yang baru lebih menjelaskan mengenai keaslian pada sebuah ciptaan, masih terdapat kekurangan yaitu pada Undang-

Undang Hak Cipta yang baru ini masih belum mengatur larangan meniru ciptaan orang lain.

Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, terutama pada penjelasan pasal 44 ayat (1) pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *substantial similarity* yang melihat sebuah pelanggaran secara substantif dan kualitatif, namun pembuktian adanya *substantial similarity* tidak cukup dengan dengan menilai dari kadar kesamaan substansial atau bagian yang pokok pada karya yang dianggap meniru, menggandakan atau memperbanyak tanpa izin tersebut, tetapi harus mempertimbangkan unsur lain selain melihat pada bagian yang penting dan khas saja pada karya yang dianggap meniru, tetapi juga memperhatikan adanya unsur akses dan proses kreativitas pada karya yang dianggap meniru, menggandakan atau memperbanyak tanpa izin tersebut, karena belum tentu karya yang dianggap memiliki kesamaan tersebut melakukan pelanggaran hak cipta. Berbeda dengan hukum hak cipta Amerika Serikat yang menjadikan *substantial similarity* sebagai standar untuk menentukan pelanggaran dan banyak juga pengadilan luar negeri yang menerapkan *substantial similarity* pada pembuktian, di Indonesia keberadaan prinsip ini masih dipertanyakan dalam menentukan pelanggaran kesamaan substansial pada sebuah karya cipta. Terkait masalah kesamaan pada ciptaan sebuah karya cipta, untuk membuktikan bahwa terjadi tindakan meniru atau menyalin, sangat dibutuhkan pengetahuan hakim mengenai unsur-unsur *substantial similarity*, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta baik yang terdahulu maupun yang sekarang belum menjelaskan secara mendalam mengenai perbuatan yang meniru atau menyalin. Pada Pasal 44 ayat (1) menjelaskan mengenai penggunaan yang tidak merupakan pelanggaran, yaitu:

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta*

Penjelasan pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:

(1) “Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.”

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 15 huruf a pada penjelasannya yang menyatakan bahwa, penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif, misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Terlihat perbedaan pada penjelasan pasal 15 huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang lama (UUHC 19 Tahun 2002) dan penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru (UUHC 28 Tahun 2014), yang menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) tidak merumuskan banyaknya persentase sebuah pelanggaran, tetapi maksud dan tujuan tetap sama.

Melihat dari perbandingan pasal di atas masih belum terdapatnya kejelasan mengenai prinsip *substantial similarity* yang pada penerapannya sangat diperlukan, perumusan mengenai “sebagian yang substansial” yang merupakan bagian yang paling penting dan khas, masih perlu penjelasan kriteria pelanggaran

yang lebih mendalam, kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam sebuah putusan pun dapat terjadi apabila hakim hanya mengacu pada pasal di atas, dengan begitu permasalahan terhadap karya yang sama dan dianggap meniru sangat di perlukan pengkajian dengan menggunakan prinsip *substantial similarity*.

Pengkajian *substantial similarity* beserta teori pembuktian tidak langsung di dalam ciptaan yang diduga meniru atau menyalin sangat penting peranannya, karena untuk membuktikan secara langsung suatu peniruan adalah hal yang sulit, pertama, jarang ada pelaku yang mau mengaku telah meniru ciptaan. Kedua, peniruan sering dilakukan secara rahasia atau dilakukan melalui peralatan non fisik, misalnya memori. Akibatnya, sedikit sekali pelapor yang mampu menghadirkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa ia telah melihat pelaku secara fisik dan telah meniru atau menyalin suatu ciptaan.

Kemudian “sebagian yang substansial” dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 44 Ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Sedangkan pada Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, “sebagian yang substansial” tersebut dijelaskan pada pasal 15 huruf a, yakni:

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak

dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama Penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Definisi suatu penggunaan yang wajar dalam UUHC yakni yang terdapat pada Pasal 15 mengenai hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu pengambilan bagian yang substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan meskipun pemakaian karya cipta orang lain kurang dari 10%.

Melihat dari Penjelasan mengenai teori-teori mengenai *substantial similarity* di atas beserta pengujiannya penting adanya untuk diketahui, apabila terdapat kasus yang menyangkut kesamaan pada pokoknya pada ciptaan dua buah karya, pengadilan di Indonesia tidak hanya menggunakan dasar yang menyatakan maksud dari "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan saja, dalam hal ini penjelasan pasal 44 ayat (1) yang mana penjelasan pasal 44 ayat (1) ini hanya sejalan dengan prinsip *substantial similarity* yang menilai bahwa kesamaan itu ada pada bagian yang substansial, tetapi juga mempertimbangkan teori-teori lain seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang dapat membantu dalam menentukan pelanggaran terhadap sebuah ciptaan yang memiliki *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya, agar menimbulkan pemahaman hukum yang baru serta terciptanya keadilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada penjelasan pasal 44 ayat (1) pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *substantial similarity* yang melihat sebuah pelanggaran secara substantif dan kualitatif,

namun pembuktian adanya substantial similarity tidak cukup dengan dengan menilai dari kadar kesamaan substansial atau bagian yang pokok pada karya yang dianggap meniru, menggandakan atau memperbanyak tanpa izin tersebut, tetapi harus mempertimbangkan unsur lain selain melihat pada bagian yang penting dan khas saja pada karya yang dianggap meniru, tetapi juga memperhatikan adanya unsur akses dan proses kreativitas pada karya yang dianggap meniru, menggandakan atau memperbanyak tanpa izin tersebut, karena belum tentu karya yang dianggap memiliki kesamaan tersebut melakukan pelanggaran hak cipta.

a. *De Minimis dan Substansial Similarity*

Analisis *substansial similarity* adalah sebuah perpanjangan alami dari doktrin *de minimis no curat lex* itu sendiri.⁷ Seperti yang kita ketahui salah satu syarat dalam dugaan pelanggaran hak cipta adalah adanya tindakan peniruan (*copying*). Tetapi tidak semua peniruan (*copying*) sudah menjadi alasan yang cukup untuk dapat ditindak secara hukum, karena harus ada persamaan pada pokoknya antara karya dari penggugat dengan karya milik tergugat, karena peniruan (*copying*) tidak selalu berarti menyalin keseluruhan karya dan tidak semua peniruan (*copying*) sama dengan penyalahgunaan.

De minimis dalam *substansial similarity* pada umumnya dikategorikan sebagai komponen kuantitatif dari *substansial similarity*. Kemudian biasanya kebanyakan pengadilan menggunakan doktrin *de minimis* dalam situasi ketika terjadi *fragmented literal similarity* dalam sebuah kasus dan menentukan bahwa *substansial similarity* ada hanya ketika jumlah dari ekspresi literal yang digandakan melebihi batasan *de minimis*, pengadilan juga sering menggunakan

⁷ Julie D. Cromer, *Op.cit.*, hlm. 271

doktrin de minimis sebagai analisis awal yang dapat digunakan oleh pengadilan sebagai pemeriksaan dini sebelum memeriksa sebuah perkara secara penuh dengan analisa *substansial similarity*.⁸

Substansial similarity dalam penggunaannya dapat dibedakan kedalam dua jenis dimana pembedaan itu diperuntukan untuk menentukan jenis dari persamaan dalam sebuah karya cipta, yang pertama adalah secara keseluruhan kedua karya cipta memiliki kesamaan namun tidak persis identik atau yang disebut *comprehensive non-literal similarity* dan situasi kedua adalah ketika sebagian kecil segmen dari karya cipta identik namun secara keseluruhan tidak atau yang disebut *fragmented literal similarity*. *Comprehensive non-literal similarity* terjadi ketika pelanggar menggunakan karyanya, keseluruhan struktur, motif atau tema fundamental dari karya original namun tidak mengambil elemen literalnya, sedangkan *fragmented literal similarity* terjadi ketika karya pelanggar tidak meniru keseluruhan struktur dari karya cipta original orang lain namun hanya mengambil sebagian elemen literal dari karya original dan menggabunhkan dengan karyanya.⁹

Kerugian finansial dari penggugat atau tergugat tidak relevan ketika menentukan kapan hak cipta sebuah karya melalui doktrin *substansial similarity*, penggunaan *doktrin de minimis* fokus terhadap jumlah elemen karya cipta yang dilanggar, bukan jumlah kerugian finansial atau keuntungan finansial yang terjadi.¹⁰ Sehingga dalam penggunaannya untuk menentukan bahwa suatu pelanggaran hak cipta adalah sebuah *de minimis*, mereka yang diduga melakukan pelanggaran harus dapat menunjukan bahwa peniruan (*copying*) dari material

⁸ Julie D. Cromer, *Op.cit.*, hlm. 267-268

⁹ Andrew Inest. *Op. Cit.*, hlm. 961

¹⁰ Julie D. Cromer. *Op. Cit.*, hlm. 267-268

yang telah dilindungi hak cipta tersebut hanya sedikit atau terkesan spele sehingga secara kuantitas tidak memenuhi batasan yang diperlukan dari *substansial similarity*. Dengan kata lain penggunaan prinsip *de minimis* dalam *substansial similarity* adalah untuk mengatakan bahwa karya cipta yang diduga melanggar hak cipta tidak mengandung “sebagian yang substansial” pada karya cipta original..

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedua prinsip ini sangat penting untuk diatur dalam Undang Undang Hak Cipta, yaitu:

1. Untuk menentukan tingkat pelanggaran hak cipta terkait perbanyakan atau penggandaan ciptaan tertentu (mutlak).
2. *De minimis* juga dapat mengurangi pengeluaran biaya beracara, sebab kasus yang dianggap *de minimis* tidak akan dipermasalahkan atau diperpanjang oleh hukum dan pihak yang terkait.
3. *De Minimis* sendiri bertujuan untuk memberikan apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. (agar tidak ada keadilan yang tertunda). Dalam hal ini bagi pihak tergugat, sebab *de minimis* dapat digunakan sebagai pembelaan jika tergugat dijatuhkan atau dikenakan gugatan yang berkaitan dengan prinsip *substansial similarity*.
4. Pengaturan *substansial similarity* dan *de minimis* juga memiliki fungsi sebagai bentuk apresiasi kepada para pembuat karya cipta atas karya ciptanya,
5. Memudahkan jalannya persengketaan yang sedang terjadi dalam hak cipta di persidangan, sebab dengan diaturnya kedua prinsip ini tentunya pengadilan lebih mudah dalam memutuskan gugatan.

Jadi dari pembahasan diatas tampak jelas baik di UUHC 2002 maupun UUHC 2014 mengatur secara kualitatif (tidak secara kuantitatif – menyebut angka) dalam menentukan prinsip *substansial similarity* (hal penting).

Jadi dapat diketahui dari UUHC lama maupun yang baru bahwa ukuran dalam menentukan *substansial similarity* tidak didasarkan pada jumlah atau persentase kesamaan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain.

Hal ini menyiratkan bahwa pihak yang menggugat adanya pelanggaran terkait *substansial similarity* harus membuktikan bahwa meskipun sedikit asalkan hal tersebut merupakan bagian yang substansial maka berpotensi terjadi pelanggaran.

Disisi lain, tergugat harus mempunyai defense bahwa hal tersebut (yang dimaksud penggugat merupakan *substansial similarity*) sebenarnya bukan bagian yang penting, karena hal tersebut sangat tidak signifikan karena terlalu remeh. Tergugat dalam hal ini melakukan defense “*de minimis*” sebagai lawan dari “*substansial similarity*”.

Pengakomodasian prinsip *de minimis* belum diatur secara jelas dalam UUHC. Hal ini perlu diatur, karena prinsip ini akan membatasi potensi gugatan berdasarkan prinsip *substansial similarity* yang mengada ada (tidak beralasan). Suatu hal kecil dapat dianggap sebagai *substansial similarity* (bagi penggugat), tetapi juga dianggap sebagai “*de minimis*” (bagi tergugat). Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan prinsip *de minimis* dan *substansial similarity* dalam UUHC 2002 dan UUHC 2014:

Tabel 1.2

Keterangan	UUHC 2002	UUHC 2014
Perbedaan	<p>Pasal: Terdapat pada penjelasan Pasal 15 huruf a.</p> <p>Penjelasan Pasal: Cukup banyak dan terdapat penjelasan yang menggunakan angka (10%).</p>	<p>Pasal: Terdapat pada Penjelasan Pasal 44 Ayat 1.</p> <p>Penjelasan Pasal: Lebih singkat dan tidak terdapat penjelasan yang menggunakan angka.</p>
Persamaan	<p>Pengaturan: Meski didalam penjelasan pasal 15 huruf a UUHC 2002 menggunakan angka, namun pengaturan prinsip substansial similarity dan de minimis tetap menggunakan cara kualitatif.</p>	<p>Pengaturan: Penjelasan pasal 44 Ayat 1 UUHC 2014, menafsirkan bahwa pengaturan prinsip substansial similarity dan de minimis dalam penggunaannya dilakukan secara kualitatif, bukan kuantitatif.</p>

B. Penerapan Prinsip *Substantial Similarity* dan Prinsip *De Minimis* dalam Kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia dan Di Amerika Serikat

1. *Substantial similarity* dan *De Minimis* dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat

1.1 Substantial Similarity dalam Hukum Hak Cipta Amerika Serikat

Dalam hukum hak cipta Amerika Serikat, *substantial similarity* merupakan sebuah standar yang digunakan untuk menentukan adanya pelanggaran yang dilakukan terdakwa mengenai hak reproduksi dari hak cipta. dan dalam hukum hak cipta amerika serikat sendiri, *substantial similarity* terbagi kedalam beberapa teori pembuktian diantaranya:

a. *Substantial Similarity* di dalam Teori Pembuktian Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*)

Substantial similarity di dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat termasuk dalam teori pembuktian secara tidak langsung, karena untuk membuktikan adanya suatu peniruan terhadap dua buah ciptaan yang sama ciptaan secara langsung bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena, pertama, jarang ada pengakuan dari tergugat bahwa ia telah meniru ciptaan penggugat. Kedua, perbuatan peniruan sering dilakukan dengan cara yang tidak diketahui atau dengan kata lain secara rahasia atau dilakukan melalui peralatan non fisik, misalnya melalui “*memory*”. Akibatnya, sedikit sekali Penggugat yang mampu menghadirkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa ia telah melihat tergugat secara fisik telah meniru suatu ciptaan. Meski sulit untuk melakukan

pembuktian secara langsung, Penggugat dapat menggunakan “pembuktian tidak langsung” (*circumstantial evidence*).¹¹

Unsur-unsur pelanggaran terhadap hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat terdapat beberapa unsur diantaranya kepemilikan (*ownership*), peniruan (*copying*), dan penyalahgunaan (*improper appropriation*). Yang dimaksud peniruan (*copying*) adalah suatu terminologi yang mencakup dan meliputi dua isu pokok yang mengatur hak-hak khusus penggugat yang telah dilanggar. Isu pertama adalah tergugat telah mengambil bagian atau porsi ciptaan penggugat secara tidak wajar, dan ini merupakan unsur substantial similarity atau kesamaan pada pokoknya. Isu yang kedua, meskipun ciptaannya mempunyai unsur substantial similarity atau kesamaan pada pokoknya, persyaratan untuk suatu tindakan “peniruan” (*copying*) belum terpenuhi jika ciptaan dari tergugat dibuat secara independen dengan kata lain, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat betul-betul telah meniru, di dalam teori pembuktian tidak langsung sebelum memasuki pembuktian dengan *substantial similarity*, pembuktian yang harus dilihat pertama kali yaitu dengan melibatkan unsur akses.

Apabila terdakwa menyangkal menyalin atau meniru, penggugat harus mengandalkan bukti untuk membuktikan unsur ini, yang memerlukan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki akses ke pekerjaan penggugat dan apakah kesamaan yang cukup ada antara dua karya yang dapat menyimpulkan bahwa pada kenyataannya tergugat telah menyalin karya penggugat.¹² Di dalam membuktikan terdapatnya unsur akses, penggugat harus memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan tergugat memiliki akses untuk melihat dan meniru

¹¹ Hendra Tanu Atmadja, loc.cit, hlm. 115-116.

¹² Pamela Samuelson, *A Fresh Look at Test for Nonliteral Copyright Infringement*, Vol. 107, No. 4, Northwestern University School of Law, USA, 2013, hlm.1824.

ciptaannya. Akses ini dapat dilihat oleh tergugat dengan cara membaca, melihat, ataupun mendengar ciptaan dari penggugat, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Namun apabila penggugat hanya membuktikan unsur akses dari tergugat hanya dengan menyatakan kemungkinan-kemungkinan (*bare possibility*) adanya unsur akses ini, maka unsur akses ini dianggap tidak ada dan menyebabkan gugatan dari penggugat dapat ditolak, sehingga di dalam membuktikan adanya unsur akses yang dilakukan tergugat terhadap ciptaan penggugat, maka hal yang harus diperhatikan yaitu:¹³

1. Tergugat merupakan bagian dari masyarakat publik dalam memiliki kesempatan yang wajar (*reasonable opportunity*) pada keadaan karya ciptaan penggugat sudah dipertunjukkan, diperlihatkan maupun didengarkan, maksud dari pengertian ini apabila suatu ciptaan penggugat telah terkenal atau populer dan ciptaan tersebut laku pada pasar, maka kondisi seperti ini yang tidak dapat dihindari atau diingkari oleh tergugat.
2. Terhadap sebuah ciptaan, maka penggugat bisa menunjukkan bukti jika karya cipta penggugat sudah dilakukan audisi, atau penggugat memberi (*submitted*) kepada tergugat, sebelum dibuatnya ciptaan tergugat, maka dengan kejadian itu bukti akses telah terjadi. Sama halnya jika ciptaan penggugat yang telah di audisi lalu diberikan (*submitted*) kepada teman dekat maupun rekan bisnis tergugat.

Pembuktian dengan akses yang didasarkan dengan spekulasi atau dugaan saja tidak cukup dalam membuktikan sebuah kasus dengan pembuktian tidak

¹³ Desrezka Gunti Larasati, **Penentuan Originalitas Ciptaan Berupa karya lagu: Tinjauan Hukum Hak Cipta**, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 46-47.

langsung. Dibutuhkan pembuktian dengan unsur lain, yaitu *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya.

Setelah pembuktian dengan akses, maka diperlukan unsur kedua untuk memperkuat pembuktian yaitu dengan *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya, unsur ini dibutuhkan untuk dapat mengetahui peniruan karya yang dianggap ditiru terdapat kesamaan, dan dari kesamaan tersebut mempunyai sifat membuktikan (*probative of copying*), seperti yang sudah penulis sampaikan di atas belum adanya definisi yang pasti mengenai pengertian *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya, tetapi dapat disimpulkan bahwa *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya memiliki makna yang tidak terlalu identik tetapi lebih atau jauh menyerupai atau mirip.¹⁴

Kedua unsur pembuktian tidak langsung, yang telah penulis paparkan di atas, dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap ciptaan (*copyright infringement*) terhadap suatu ciptaan. *Substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya tidak cukup untuk membuktikan adanya peniruan oleh tergugat atas ciptaan penggugat. Dalam hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap orang dengan bebas dapat meniru ide yang tertuang dalam suatu ciptaan untuk memperoleh inspirasi-inspirasi, sehingga memungkinkan adanya kesamaan ciptaan si peniru ide dengan ciptaan idenya yang ditiru. Meski seperti itu pencipta tidak dapat meniru sepenuhnya ekspresi dari pencipta atas ide tersebut. Sekalipun ada ekspresi suatu ciptaan yang ditiru, maka harus bersifat substansial.

Untuk membuktikan adanya tindakan peniruan (*copying*) ciptaan oleh tergugat, ciptaan tergugat harus terdapat unsur *substantial similarity* atau

¹⁴ *Ibid.*

kesamaan pada pokoknya dan juga tergugat memiliki akses yang cukup untuk melakukan tindakan peniruan dari karya penggugat, selain itu penggugat harus dapat menunjukkan tindakan yang ditiru tergugat yang dibuat secara tidak independen. Pada intinya penilaian orisinalitas berdasarkan *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya adalah sebegitu miripnya sebuah karya cipta dengan karya cipta lain sehingga masyarakat pada umumnya dapat percaya bahwa kuat kemungkinannya karya cipta tersebut atau setidaknya bagian penting atau substansial dari karya cipta itu, meniru dari karya cipta yang sudah ada sebelumnya

Dalam menentukan kesamaan substansial pada sebuah ciptaan karya cipta selain terdapat pada teori pembuktian tidak langsung, masih terdapat beberapa teori lain yang merupakan pengembangan dari teori pembuktian tidak langsung, yaitu:

b. Teori Kesamaan secara Harfiah (*Verbatim Similarity*)

Kesamaan harfiah atau verbatim similarity memiliki dua cara yaitu meniru secara keseluruhan dari aslinya atau harfiah dan cara kedua mengambil keseluruhan dari pola beserta susunan pada suatu ciptaan. Dimana tergugat tidak perlu menyalin ciptaan secara keseluruhan, pada teori ini tidak ada aturan pasti mengenai beberapa banyak peniruan, secara kualitatif atau kuantitatif, tetapi menurut teori ini penyalinan satu kalimat dari sebuah karya, secara teoritis dapat merupakan suatu pelanggaran tergantung pada kalimat yang diambil, dengan kata lain tergugat melakukan peniruan apabila menyalin suatu ciptaan dengan

mengambil bagian pola dan susunan yang penting atau khas sehingga memiliki kesamaan pada pokoknya atau *substantial similarity*.¹⁵

Menjadi sebuah toleransi atau dapat dibenarkan apabila pengambilan karya hak cipta yang berasal dari kompilasi fakta-fakta ataupun buku petunjuk (...*a wider taking tolerated copyrighted work which are made up essentially public domain materials, such as compilations of facts and directories...*) dibuat berdasarkan pada materi yang menjadi public domain, lain halnya untuk karya seperti novel dan puisi peniruan secara harfiah yang sedikit saja sudah merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.¹⁶

Verbatim similarity memiliki kaitan yang erat dengan istilah *slavish copying* yang menurut artinya dalam bahasa Indonesia adalah peniruan yang tidak mengandung keaslian, dan dalam pengertiannya menurut teori plagiarisme, *slavish copying* adalah meniru atau mengutip kata demi kata (*word to word*) dari ciptaan pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya, dan peniruan atau pengutipan ini melingkupi bagian-bagian yang substansial pada ciptaan lain, istilah ini biasa digunakan dalam tindakan plagiarisme pada sebuah karya tulis dan puisi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa bentuk peniruan pada teori *verbatim similarity* atau kesamaan harfiah ini pada dasarnya digunakan dalam mengidentifikasi adanya *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya pada sebuah ciptaan dengan ciptaan lain, apabila sebuah ciptaan yang baru memiliki *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya pada sebuah ciptaan yang lebih dahulu ada dan kesamaan itu memiliki kesamaan pada bagian

¹⁵ Marshall A. Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Fifth Edition, Indiana University, New York: Matthew Bender and Company, 2011, hlm. 425.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Henry Soelistyo, **Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika**, Kanisius, 2011, hlm. 19-22.

yang penting atau substansial maka dapat dipastikan bahwa ciptaan yang baru tersebut dibuat dengan tidak independen, dengan pengertian bahwa pencipta dari karya cipta yang baru tersebut melakukan tindakan peniruan terhadap karya cipta yang lebih dahulu ada, dengan begitu karya cipta yang baru ini bukan merupakan karya yang asli atau orisinal.

c. Teori Kesamaan yang Begitu Mencolok (*Striking Similarity*)

Pada teori ini melihat kesamaan yang begitu mencolok dengan mengembangkan teori pembuktian tidak langsung yaitu pada unsur akses, yaitu dengan menilai suatu ciptaan yang mempunyai unsur kesamaan yang begitu mencolok dengan ciptaan lain, dengan unsur kesamaan yang begitu mencolok sudah dapat dipastikan bahwa ciptaan tersebut bukan berasal dari pencipta tersebut dan bukan ciptaan yang independen. Suatu terminologi yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, memberikan definisi *strikingly similarity* atau kesamaan yang begitu mencolok dengan pengertian *proof of access* atau tingkat kesamaan dapat menyimpulkan terdapatnya unsur peniruan meskipun tanpa adanya unsur akses.¹⁸ Pada dasarnya peniruan dapat terjadi dengan tiga (3) kemungkinan:¹⁹

1. peniruan secara sadar (*conscious copying*),
2. peniruan secara tidak sadar (*unconscious or subconscious copying*),
3. peniruan dengan ketidak sengajaan (*coincidence copying*).

Pengadilan luar negeri seperti Amerika Serikat mempunyai rumusan mengenai *strikingly similarity* atau kesamaan yang begitu mencolok, yang dilakukan dengan cara penggugat harus membuktikan terdapatnya unsur

¹⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Op.cit.*, hlm.119.

¹⁹ David Vaver, *Principles of Copyright: Case and Materials, World Intellectual Property Organization*, Geneva, 2002, hlm. 138.

kesamaan yang dapat memberikan kepastian bahwa memang terdapat unsur peniruan secara sadar (*conscious copying*) dan tidak terjadi karena kebetulan, atau diperoleh dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada, dengan kata lain unsur kesamaan itu ada dikarenakan tidak terdapatnya keunikan, kerumitan atau bentuk yang kompleks pada ciptaan yang meniru tersebut.²⁰

Dengan demikian, bentuk peniruan ini karena dirasa memiliki kesamaan yang begitu mencolok, baik kesamaan pada keunikan, kerumitan atau bentuk yang kompleks, atau dapat dikatakan peniruan itu terjadi pada bagian yang penting atau substansial dan yang tidak substansial, maka sudah dapat dipastikan tanpa melihat unsur akses dan juga *substantial similarity*, dalam bentuk peniruan ini dalam kasusnya apabila ahli sudah menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan yang begitu mencolok pada karya tergugat, berarti memang pada karya tergugat tidak terdapat keunikan, kerumitan serta kompleksitas atau bisa dianggap ciptaan tergugat memang benar-benar sepenuhnya meniru tanpa kreasi independen dari tergugat atau dengan kata lain karya tergugat tidak asli atau orisinal, maka penggugat tidak perlu membuktikan unsur akses, karena akses sudah pasti dianggap ada, dan sudah termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

d. Teori Kreasi Independen (*Independent Creation Theory*)

Teori ini di dalam pengadilan di Amerika Serikat, sebuah karya hak cipta harus berasal dari karya asli pengarang untuk mendapatkan perlindungan (*A copyrightable work must also be an "original work of authorship" to receive protection*). Karya asli atau orisinal yang dimaksud dari teori ini adalah bahwa pekerjaan pengarang harus dibuat secara independen dan minimal memiliki unsur-

²⁰ Hendra Tanu Atmadja, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

unsur kreativitas, lalu kriteria dari karya yang independen itu yaitu, pertama ciptaan independen (*independent creation*) hasil dari pencipta itu sendiri dan tidak berasal peniruan dari karya orang lain, dan yang perlu diingat bahwa orisinalitas tidak harus memiliki kebaruan (*novelty*), persyaratan kedua yaitu setidaknya memiliki unsur-unsur kreativitas, Jadi sebuah ciptaan orisinal tidak harus memiliki kebaruan selama masih mengandung unsur-unsur kreativitas di dalamnya.²¹

Teori ini dapat digunakan sebagai perlawanan dari tergugat apabila dalam kasusnya tergugat diduga melakukan peniruan terhadap karya penggugat, maka tergugat dapat memberikan perlawanan dengan membuktikan fakta-fakta bahwa karya tergugat memiliki kreasi independen dan sedikitnya memiliki unsur-unsur kreativitas di dalamnya, untuk melawan bukti akses dan substantial similarity atau kesamaan pada pokoknya, dengan demikian jika pada kasus ciptaan tergugat terdapat unsur akses dan substantial similarity atau kesamaan pada pokoknya, bukan berarti tergugat telah meniru karya penggugat, apabila tergugat dapat membuktikan fakta-fakta bahwa ciptaannya dibuat secara independen dan terdapat kreativitas di dalamnya.

Dengan demikian, kemiripan antara dua buah ciptaan, apabila ciptaan tersebut memang dibuat secara independen dan memiliki kreativitas di dalamnya selama tindakan peniruan itu dilakukan tidak dilakukan secara sadar (*conscious copying*), maka dalam proses pada penciptaan karya cipta belum tentu ciptaan tersebut meniru ciptaan lain, karena peniruan itu tidak ada, maka ciptaan tersebut

²¹ Database and Law, *Copyright Protection Generally* (online), <http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dougf/index.html> (20 April 2018).

merupakan ciptaan yang asli atau orisinal dan tidak terdapat pelanggaran hak cipta.²²

Kesamaan pada pokoknya memiliki dua unsur dalam pola peniruan, yaitu *verbatim similarity* atau kesamaan harfiah dan *striking similarity* atau kesamaan yang begitu mencolok seperti yang sudah dijelaskan di atas, *verbatim similarity* memiliki dua cara yaitu meniru secara keseluruhan dari aslinya atau harfiah dan cara kedua mengambil keseluruhan dari pola beserta susunan pada suatu ciptaan. Lalu sesuai dengan artinya yaitu kesamaan yang begitu mencolok, *striking similarity* sehingga dapat dipastikan ciptaan tersebut tidak berasal dari pencipta itu sendiri melainkan peniruan hasil dari ciptaan orang lain. Sebelum sampai kepada pemeriksaan adanya *substantial similarity* pada kasus kesamaan antara dua buah karya cipta diperiksa pengadilan, Hakim diharuskan telah menganalisa dan mendengar dari beberapa bukti yang disampaikan atau beberapa bukti yang terkait dengan:

1. Keterangan yang disampaikan penggugat.
2. Keterangan yang disampaikan tergugat.
3. Ada atau tidaknya proses kreativitas yang terlibat dalam pembuatan ciptaan.
4. Proses yang ditempuh dalam membuat sebuah ciptaan itu ada.
5. Alasan mengapa ciptaan itu diproduksi, ada atau tidaknya usaha kreatif dari tergugat, kebiasaan penggugat dan
6. Dalam keadaan pada ciptaan yang meniru itu bisa mempengaruhi pasar.

Setelah hakim telah memeriksa bukti-bukti di atas, penerapan *substantial similarity* barulah dapat dilakukan untuk mengetahui pelanggaran dengan

²² Desrezka Gunti Larasati, *Op. cit.*, hlm. 53.

menggunakan *substantial similarity test* yaitu pengujian dengan membuktikan adanya persamaan secara substansial pada kedua buah ciptaan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya peniruan atau penyalinan dari ciptaan yang diduga telah meniru tersebut.

Substantial similarity test pada tahap pertama dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Ordinary Observer and More Discerning Ordinary Observer* dalam metode *Ordinary Observer Test* atau tes pengamatan biasa dalam kasusnya bahwa karya dari penggugat adalah sepenuhnya asli tanpa menggunakan unsur dari karya lain dengan melihat penilaian rata-rata orang awam terhadap karya tergugat sebagai tindakan yang meniru dari karya penggugat dan dengan tidak menggunakan pembedahan satu persatu elemen dari karya tersebut dan tanpa bantuan ahli.

Tidak cukup dengan melihat dari metode *Ordinary Observer Test* atau pengamatan biasa, untuk menentukan sebuah peniruan dapat melangkah kepada tahap selanjutnya yaitu metode *More Discerning Ordinary Observer* atau pengamatan yang lebih tajam dari pengamatan biasa, yaitu dengan mengekstrak dengan menghilangkan “*unprotectible elements*” elemen-elemen yang tidak dilindungi hak cipta, kemudian dibandingkan untuk menemukan masihkah terdapatnya kesamaan *substantial similarity* pada “*protectable elements*” elemen-elemen yang dilindungi. Dan dalam metode ini tetap harus mempertimbangkan tampilan keseluruhan karya dari kedua ciptaan penggugat dan tergugat.

Mungkin yang paling mudah untuk menjelaskan *More Discerning Ordinary Observer* atau pengamatan yang lebih tajam dari pengamatan biasa dengan menggunakan hipotetis. Sebagai contoh penggugat mengklaim tergugat yang telah

melanggar hak cipta penggugat pada lagu blues. Terdakwa menyangkal peniruan lagu blues tersebut, tapi ternyata penggugat dapat membuktikan terdakwa yang berada di klab musik blues ketika penggugat menyanyikan lagu tersebut, sehingga terdakwa memiliki akses kepada lagu penggugat. Untuk membuktikan bahwa tergugat meniru, penggugat masih harus menunjukkan pembuktian antara dua buah karya tersebut, maka penggugat dapat melakukannya dengan cara kesaksian ahli yaitu ahli musik yang cenderung bersaksi sebatas mengenai kesamaan atau perbedaan pada karya-karya tersebut dan mereka memberikan pendapat mengenai kemungkinan bahwa salah satu lagu telah ditiru. Jika pencari fakta percaya musikolog atau saksi ahli penggugat, maka pencari fakta harus menentukan bahwa dua lagu tersebut terdengar sama di telinga orang biasa. Tapi kita harus ingat bahwa lagu keduanya lagu-lagu blues. Yang mana lagu blues memiliki karakteristik-karakteristik tertentu dengan semua lagu-lagu blues, seperti penggunaan frase (12) dua belas bar. Pencari fakta tidak lagi harus mempertimbangkan dengan kesamaan umum pada lagu-lagu blues untuk menentukan kesamaan substansial pada karya yang serupa, sebaliknya dalam kasus seperti ini *More Discerning Ordinary Observer* atau pengamatan yang lebih tajam dari pengamatan biasa diperlukan untuk memutuskan bahwa selain dari kenyataannya bahwa dua lagu tersebut keduanya adalah lagu-lagu blues dan merupakan lagu-lagu blues yang terdengar sama.

More Discerning Ordinary Observer test ini dapat disimpulkan bahwa metode ini menilai sebuah kesamaan substansial dengan melihat ekspresi dari ciptaan tersebut, dan tidak melihat ide sebagai penilaian orisinalitas, metode ini sesuai dengan hukum hak cipta dan *doktrin idea and expression dichotomy* yang

melindungi ekspresi tetapi tidak melindungi ide (...*protecting expressions but not ideas...*). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menyatakan:

“Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan (ekspresi) dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.”

Ketentuan ini diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan di negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;*
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan*

Melihat dari penjelasan *Ordinary Observer and More Descending Ordinary Observer* di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Ordinary Observer* sebagai penilaian orisinalitas dengan melihat melalui respons dan pendengaran orang biasa pada umumnya dan *More Descending Ordinary Observer* ini biasa digunakan pengadilan untuk menentukan pelanggaran sebuah ciptaan yang memiliki kesamaan substansial yaitu dengan melihat dari ekspresi sebuah ciptaan dan tidak melihat suatu ide dari sebuah ciptaan tersebut.

Selain metode *Ordinary Observer and More Descending Ordinary Observer* untuk dapat mengetahui substantial similarity atau kesamaan substansial pada sebuah lagu, terdapat metode *Extrinsic and Intrinsic Test*. Tahap pertama dalam metode ini adalah dengan menggunakan *Extrinsic Test*, pada tahap ini menentukan adanya bukti kesamaan substansial dengan cara menentukan kesamaan ide yang dipakai dengan bantuan ahli. Pada dasarnya tes ini melihat kriteria dalam menilai kesamaan ide pada dua buah ciptaan yaitu pada jenis karya

seni yang terlibat, materi atau bahan yang dipakai pencipta, subjeknya, dan juga latar belakang dari subjek tersebut, setelah melalui tahapan ini dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap *Intrinsic Test*.

Tahap kedua yaitu *Intrinsic Test*, yaitu menemukan kesamaan substansial dengan cara membandingkan respons atau pendapat orang biasa atau awam ke dalam dua karya tanpa penggunaan ahli atau analisis, tes ini digunakan untuk mengetahui kesamaan substansial pada ekspresi antara dua buah karya, tes ini juga merupakan tes dengan penilaian subjektif.

Pada metode ini dapat dilihat bahwa metode *Extrinsic and Intrinsic Test* ini merupakan metode yang saling melengkapi, pada *Extrinsic* menilai kesamaan secara objektif dengan melihat adanya kesamaan pada ide dan *Intrinsic* menilai kesamaan dengan subjektif yaitu menilai ekspresi dari dua buah ciptaan melalui pendengaran orang biasa. Namun yang perlu diingat bahwa, ide tidak dilindungi oleh hak cipta, dalam metode *Extrinsic* menggunakan kesamaan ide dengan maksud, dari kesamaan ide tersebut, dalam perwujudan ekspresinya terdapat kesamaan substansial atau tidak.

Metode berikutnya adalah *Abstraction-Filtration-Comparison*, pada langkah *Abstraction* (abstraksi) yaitu dengan melakukan pemisahan ide-ide yang merupakan bagian yang tidak dilindungi hak cipta, dari suatu ciptaan, lalu kemudian melakukan *Filtration* (penyaringan) yaitu dengan menyaring bagian yang telah dipisahkan dari ide yaitu ekspresi yang merupakan bagian yang dilindungi hak cipta, lalu pada *Comparison* (komparasi) yaitu membandingkan elemen-elemen yang dilindungi tersebut (ekspresi) untuk akhirnya dapat

menentukan diantara dua buah ciptaan yang mirip ada atau tidaknya kesamaan substansial.

Metode-metode di atas pada umumnya memisahkan antara ide dengan ekspresi, lebih jelasnya tidak melihat ide dan lebih memperhatikan ekspresi dalam membuktikan ada atau tidaknya kesamaan substansial, selain menilai dari ekspresi dalam menentukan kesamaan substansial tetap harus membuktikan bahwa di dalam tindakan peniruan adanya unsur akses, yaitu akses yang cukup untuk melihat ciptaan yang ditiru.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui terdapatnya kesamaan substansial atau *substantial similarity* dapat dilakukan dengan *substantial similarity test*, yang memiliki metode *Ordinary Observer and More Descending Ordinary*, *Extrinsic and Intrinsic Test* dan *Abstraction-Filtration-Comparison*. Pada metode *Ordinary Observer and More Descending Ordinary*, yang pada intinya dari semua metode diatas adalah sama yaitu memberikan penilaian lebih khusus kepada kesamaan ekspresi, dan metode ini digunakan oleh pengadilan Amerika Serikat pada tingkat pengadilan yang berbeda. Selain itu metode-metode ini memiliki keakuratan yang cukup tinggi dalam menentukan kesamaan substansial dan karena keakuratannya metode-metode yang ada di dalam *substantial similarity* ini, paling sering digunakan pada kasus-kasus di pengadilan luar negeri yang menyangkut kesamaan substansial.

1.2 De Minimis dalam Hukum Hak Cipta Amerika Serikat

De minimis merupakan prinsip yang baru-baru ini digunakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Istilah itu sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1796 di Amerika Serikat dan diperkenalkan oleh Justice Paterson

(Hakim Agung), kemudian prinsip ini sempat terabaikan seluruhnya oleh Pengadilan sampai 1865. "*De minimis non curat lex*" yang berarti berarti "hukum tidak menyibukkan diri dengan hal-hal sepele." Pengadilan dapat menggunakan doktrin untuk menemukan bahwa klaim itu begitu sepele sehingga keputusan tidak perlu diambil untuk kasus itu.

*"Litigants lose when their stance is cast as trivial or when they fail to persuade the judge that their adversary has made a trivial claim."*²³

Pengadilan di Amerika Serikat sendiri mengaplikasikan prinsip *de minimis* kedalam kasus pelanggaran hak cipta ini kedalam tiga cara yang berbeda, diantaranya:²⁴

1. Pembelaan *de minimis* berlaku ketika pelanggaran teknis dari sebuah hak cipta sangat sepele sehingga hukum tidak mengenakan konsekuensi legal
2. *De minimis* dapat berarti penyalinan yang terjadi sangat sedikit/sepele sehingga berada dibawah batasan kuantitatif *substantial similarity*
3. Pembelaan *de minimis* mungkin dianggap relevan terhadap doktrin *fair use*

Pengadilan *United States Court of Appeals 2nd Circuit* sendiri telah mendeskripsikan *de minimis* kedalam ruang lingkup hak cipta sebagai doktrin yang membebaskan dugaan pelanggaran hak cipta yang sangat sepele sehingga tidak perlu diberikan akibat hukum dari perbuatan tersebut.²⁵ Pelanggaran seperti ini terjadi setiap hari seperti kita ketahui pengunduhan (*downloading*), pencetakan (*print*) sebuah konten dari internet merupakan sebuah tindakan penggandaan dari hak cipta.²⁶

²³ Anita Bernstein, *Civil Rights Violations = Broken Windows: De minimis Curet Lex*, 62 FLA. L. REV. 895, 897-98 (2010).

²⁴ Julie D. Cromer, *Op. Cit.*, hlm. 266.

²⁵ Andrew Inest, *Op.Cit.*, hlm.970

²⁶ Julie D. Cromer, *Op.Cit.*, hlm.266

Oleh karena itu *Second Circuit Court* dalam kasus *Davis v. Gap*²⁷, Inc menyatakan bahwa:

*Trivial copying is significant part of modern life. Most honest citizen in the world frequently engage, without hesitation, in trivial copying that, but for the minimis doctrine, would technically constitute a violation of the law. We do not hesitate to make a photocopy of a letter from a friend to show to another friend, or of a favorite cartoon to post on the refrigerator. Parents in Central Park photograph their children perched on Jost de Creeft's Alice in Wonderland sculpture. We record television programs aired while we are out, so as to watch them at a more convenient hour. Waiters at a restaurant sing "Happy Birthday" at a patron's table. When we do such things, it is not that we are breaking the law but unlikely to be sued given the high cost of litigation. Because of the de minimis doctrine, in trivial instances of copying, we are in fact not breaking the law.*²⁸

Berdasarkan definisi tersebut ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran teknis terhadap hak cipta sebenarnya bukan berarti kita melanggar hukum namun kita tidak digugat ke pengadilan karena akan menimbulkan biaya yang besar dalam beracara. Sehingga karena doktrin *de minimis* dalam hal penggandaan atau penyalinan yang sepele atau sedikit, kita pada dasarnya tidaklah melanggar hukum.

Dasar pemikiran yang berada dibelakang prinsip *de minimis* terhadap pelanggaran hak cipta yang sepele atau tidak signifikan tersebut adalah karena pelanggaran tersebut tidak sepadan dengan waktu dan usaha dalam mengajukan gugatan hukum serta biaya hukum pengadilan. Sehingga hukum menggunakan doktrin *de minimis* tersebut untuk membatalkan penyebab pelanggaran dalam kasus tersebut.²⁹

²⁷ Kasus *David v. Gap, Inc.*, (2nd Cir. 2001) adalah kasus tentang penggunaan kaca mata yang bernama (*Onoculi Designs*) milik *Davis* (penggugat) yang sudah dilindungi hak cipta, digunakan secara melawan hukum oleh *Gap* (tergugat) yang merupakan perusahaan retail internasional dalam iklannya yang mana secara mencolok menampilkan model yang menggunakan kacamata milik penggugat

²⁸ Andrew Inest, *Op.Cit.*, hlm.970

²⁹ Julie D. Cromer, *Op.Cit.*, hlm.266

2. Penerapan Prinsip *Substantial Similarity* dan Prinsip *De Minimis* dalam Kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia dan Di Amerika Serikat

1.1 Penerapan *De Minimis* dan *Substantial Similarity* pada Kasus yang terjadi di Indonesia

1.1.1 Prinsip *De Minimis* dalam Kasus Hak Cipta di Indonesia

Prinsip *De Minimis* ini pada dasarnya belum diatur didalam Undang-Undang di Indonesia. Karena belum adanya kasus di Indonesia yang pernah menggunakan prinsip *de minimis*, baik dengan istilah *de minimis* atau dengan istilah lain sebagai pembelaan dalam kasus pelanggaran hak cipta, serta langkanya kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang masuk kedalam ranah pengadilan, maka untuk menginterpretasikan penggunaan prinsip *de minimis* dalam hak cipta kita perlu mempertimbangkan penerapannya kepada jurisprudensi dari kasus-kasus yang terjadi diluar indonesia khususnya Amerika, walaupun di Amerika sendiri kasus yang menggunakan prinsip *de minimis* dalam hak cipta juga tidak banyak, baik yang secara jelas menyatakan prinsip ini dengan nama *de minimis* atau dengan istilah lain.³⁰

1.1.2 Prinsip *Substantial Similarity* dalam Kasus *Hang Out v. And Then Were None*

Di Indonesia sendiri upaya dalam mengantisipasi kasus seperti ini sebenarnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri yaitu

³⁰ Andrew Inest, Op. Cit., hlm. 948

pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pada penjelasan pasal 44 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.”

Jadi, berbeda dengan prinsip *de minimis*, prinsip *substansial similarity* sendiri sudah terdapat pengaturannya didalam undang undang hak cipta. Walaupun belum banyak kasus didalam hak cipta yang menggunakan prinsip ini.

Salah satu contoh kasus yang bisa dikenakan prinsip *Substansial Similarity* dalam hak cipta di indonesia adalah pada kasus film "*Hang Out*" (2016) karya Raditya Dika vs. Agatha Christie, yang menerbitkan novel berjudul "*And Then Were None*" pada tahun 1939.

Dalam kasus ini, film "*Hang Out*" milik Raditya Dika dapat dikenakan prinsip *substansial similarity*, sebab alur cerita dan setting dari karya Raditya Dika tersebut memiliki kesamaan yang substansial dengan novel "*And Then Were None*".

Berikut ini merupakan sinopsis novel "*And Then Were None*" karya Agatha Christie³¹:

On a hot day in late August 1939, eight people, all strangers to each other, are invited to a small, isolated island off the coast of Devon, England, by a "Mr and Mrs Owen". The guests settle in at a mansion tended by two newly hired servants, Thomas and Ethel Rogers, but their hosts are absent. When the guests sit down to dinner, they notice the centrepiece, ten figurines of soldiers arranged in a circle. Afterward, Thomas Rogers puts on a gramophone record, from which a voice accuses everyone present of murder. Shortly after this, one of the party dies from poisoning, and then more and more people are murdered, all in methods synonymous with a nursery rhyme the island is named after, and the murderer removes a figurine from the dining table each time someone is killed. The remaining people decide to work together. They must discover who the murderer is before they run out of time and nobody remains.

³¹ <http://insommia.net/hangout-vs-none-raditya-dika-plagiat/> diakses pada tanggal 21 Mei 2018

Sedangkan berikut ini merupakan synopsis dari film “hangout” karya Raditya Dika:

Raditya Dika, seorang actor, mendapatkan undangan untuk HANGOUT, dari seorang pengirim misterius. Undangan tersebut menjanjikan sejumlah uang yang akan mengatasi kesulitan keuangannya. Syaratnya, dia harus pergi ke sebuah rumah ditengah pulau terpencil. Raditya memenuhi undangan tersebut.

Ketika sampai di pulau, Raditya baru sadar bahwa ada public figure lain yang diundang ke pulau tersebut: Prilly Latuconsina, Surya Saputra, Titi kamal, Gading Marten, Soleh Solihun, Dinda Kanya Dewi, Bayu Skak dan Mathias Muchus. Sembilan orang public figure yang memenuhi undangan HANGOUT.

Ketika makan malam, Mathias Muchus mati diracun. Mereka semua terkejut, lalu sadar jangan jangan mereka dijebak. Perlahan mereka mati satu per satu, dibunuh dengan cara masing-masing. Kejadian yang seharusnya menyeramkan menjadi penuh dengan komedi karena sifat-sifat public figure ini yang membuat suasana menjadi hancur berantakan: mulai dari Surya yang penakut hingga ke Dinda Kanya Dewi yang joroknya diluar akal sehat.

Pertanyaannya : Bisakah mereka selamat? Siapa yang tersisa di pulau itu? Mungkinkah pembunuhnya salah satu dari mereka?

Dari kutipan kedua synopsis diatas, dapat dilihat kesamaan yang cukup substansial diantara kedua karya tersebut. Walaupun kasus ini tidak sampai ke ranah pengadilan, namun kasus ini dapat dikenakan prinsip substansial similarity. Dimana alur cerita film “Hangout” karya Raditya Dika tersebut memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan novel karya Agatha Christie.

1.2 Penerapan *De Minimis* dan *Substantial Similarity* pada Kasus yang terjadi di Amerika Serikat

1.2.1 Prinsip *De Minimis* dalam Kasus *Knickerbocker Toy v. Azrak-Hamway International, Inc*

Pada kasus *Knickerbocker Toy v. Azrak-Hamway International, Inc*³². Tergugat (*Knickerbocker Toy*) dalam kasus ini diduga menggunakan ilustrasi dari produk penggugat (*Azrak-Hamway International*) yang sudah terlebih dahulu dicatatkan, tergugat menggunakan ilustrasi produk tersebut dalam bungkus mainan miliknya. Dalam penggunaannya bungkus mainan ini digunakan secara terbatas yakni hanya dalam lingkungan perusahaan, dan tergugat menyatakan bahwa nantinya ilustrasi dari bungkus tersebut akan diubah apabila dijual ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa karena bungkus tersebut hanyalah digunakan dalam lingkungan kantor dan tidak pernah digunakan ke publik, maka gugatan tersebut termasuk kedalam prinsip *de minimis non curat lex*, karena kasus ini sendiri belum mengakibatkan kerugian materil bagi penggugat, karenanya pengadilan menyatakan penolakan atas gugatan tersebut. Dari putusan *de minimis* didalam hukum hak cipta amerika serikat ini dapat dilihat bahwa prinsip ini berarti dapat diterapkan didalam hukum hak cipta Indonesia, karena hal-hal seperti didalam kasus ini dapat saja terjadi, dimana *de minimis* sendiri dapat digunakan sebagai defense atau pembelaan khususnya bagi tergugat yang dalam kasusnya tidak menimbulkan kerugian materil sedikitpun bagi penggugat.

³² Andrew Inest, *Op. Cit.*, hlm. 972

1.2.2 Prinsip *Substantial Similarity* dalam Kasus Led Zeppelin v. Spirit

Bagian komposisi musik "*Stairway to Heaven*" karya Led Zeppelin³³, dituduh dicuri dari band lain. Gugatan tersebut, yang menuduh band Inggris itu mencuri kord pembuka untuk lagu tahun 1971 itu dari lagu instrumental "Taurus" (1967) milik band Amerika, Spirit, diajukan oleh Michael Skidmore, pewaris mendiang Randy Wolfe, gitaris Spirit dan pencipta "Taurus." Yang mengatakan menemukan kesamaan "substansial" dalam dua menit pertama kedua lagu,

"*Stairway to Heaven*" dianggap sebagai salah satu dari komposisi yang paling banyak didengar dalam sejarah rock dan merupakan lagu khas Led Zeppelin, yang bubar tahun 1980.

Dalam kasus terbaru ini, personil Led Zeppelin (Plant dan Page) muncul di pengadilan dan dijadwalkan untuk bersaksi dalam sidang. Skidmore mengatakan Page mungkin terinspirasi menulis "*Stairway*" setelah mendengar Spirit memainkan "Taurus" ketika kedua band itu tur bersama tahun 1968 dan 1969, namun Wolfe tidak pernah mendapat apresiasi.

Namun kemudian, Led Zeppelin dinyatakan tidak meniru nada pembukaan lagu *Stairway to Heaven* dari kelompok musik Amerika Serikat, Spirit, demikian diputuskan juri pengadilan AS.

Selama ini muncul tuduhan Led Zeppelin telah 'mengambil' bagian lagu Spirit dari tahun 1967, berjudul Taurus, tetapi juri memutuskan lagu itu "pada dasarnya tidaklah mirip" dengan pembukaan *Stairway*.

Selama persidangan, para pengacara mengatakan nada yang dipermasalahkan sangatlah umum dan telah digunakan selama lebih 300 tahun.

³³ <https://www.rollingstone.com/music/news/appeal-filed-in-led-zeppelin-stairway-to-heaven-trial-w472692> diakses pada tanggal 21 mei 2018

Hakim di Edward R. Roybal Federal Building, California, Amerika Serikat, telah mengetuk palu. Dilansir Mashable, tidak terbukti ada plagiarisme yang dilakukan Led Zeppelin dalam lagu "*Stairway to Heaven*" terhadap instrumentalia "Taurus" dari band Spirit.

Peter J. Anderson sebagai pengacara Jimmy Page (gitaris) dan Robert Plant (vokalis) dari Led Zeppelin telah meminta persidangan dihentikan. Pasalnya dalam beberapa kali persidangan, pihak penggugat tak berhasil memberikan bukti kepada para juri.

Beberapa hal yang membuat Malofiy terpojok adalah kegagalannya menunjukkan pendaftaran hak cipta "Taurus", ahli waris Wolfe juga tidak punya bukti sebagai pemegang hak cipta lagu, dan gagal meyakinkan para juri bahwa Led Zeppelin telah mendengar "Taurus" (1968) sebagai panduan dalam menulis "*Stairway to Heaven*" (1971).

Intro lagu yang dipermasalahkan pihak penggugat merupakan akor umum yang muncul dalam lagu-lagu rakyat tanpa nama pencipta sejak dahulu kala. Payung hak cipta tidak melindunginya. Banyak musikus kemudian mengadopsinya dengan beragam gaya. Misal intro lagu "*We Used To*" yang dinyanyikan Dolly Parton pada 1975.

Charles Cronin, pemerhati plagiarisme musik dan pendiri *Music Copyright Infringement Resource*, mengatakan kepada Salon bahwa intro kedua lagu tersebut memang mirip. "Namun bukan berarti menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta."

Dosen di *University of Southern California Gould School of Law* itu menambahkan bahwa materi yang dijadikan dasar tuntutan merupakan rangkaian

musik yang telah menjadi publik domain. Akor tersebut telah lama digunakan dan menghiasi banyak lagu.

Tuntutan terhadap plagiarisme yang dilakukan Led Zeppelin dilayangkan ahli waris Wolfe sejak 2014. Hal tersebut membuat Anderson keheranan. "Seharusnya tuntutan ini melayang sejak tahun 1972, bukannya berselang hampir setengah abad saat Wolfe telah meninggal dan ingatan para personel Zeppelin pikun digerus usia.

Jumlah dalam rentang tersebut berkisar USD60 juta yang datang dari pembayaran album, unduh digital, kerja sama dengan label, dan pendapatan lainnya dari layanan pengaliran musik.

Alih-alih mendapatkan pembagian royalti tersebut, kekalahan pihak Skidmore dan Wolfe membuat mereka harus mengeluarkan uang untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Led Zeppelin untuk membayar pengacara selama proses persidangan.

Analisis

Berdasarkan kasus Led Zeppelin vs. Spirit ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *substansial similarity* dapat digunakan apabila penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat memang menggunakan sebagian substansial dari karya yang dimilikinya yang telah dilindungi hak cipta. Hakim sendiri pun tidak dapat menjatuhkan putusan kepada tergugat, apabila penggugat tidak bisa membuktikan bahwa karya yang dimiliki atau yang dibuat tergugat terdapat bagian yang substansial miliknya.

Jadi dari pembahasan diatas tampak jelas bahwa prinsip *Substansial Similarity* dan *De Minimis* sudah digunakan didalam Undang-Undang Hak Cipta

di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan *Substansial Similarity* sudah terdapat didalam Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, meskipun pengakomodasian prinsip *De Minimis* belum diatur secara jelas didalam Undang Undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan pengaturannya, sebab kedua prinsip ini sangat erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta, melihat sebenarnya banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia, guna menentukan tingkat pelanggaran hak cipta terkait perbanyakan atau penggandaan ciptaan tertentu (mutlak).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan pengaturan *prinsip de minimis* dan prinsip *substansial similarity* pada undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu baik UUHC 2002 maupun UUHC 2014 mengatur secara kualitatif dalam menentukan prinsip substansial similarity, tidak didasarkan pada jumlah atau persentase kesamaan antara masing-masing ciptaan. Berarti dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa bagian substansial dari karyanya memang ditiru oleh pihak lain. Sedangkan tergugat harus mempunyai defense bahwa hal tersebut (yang dimaksud penggugat merupakan *substansial similarity*) sebenarnya bukan bagian yang penting, karena hal tersebut sangat tidak signifikan sangking remehnya. Tergugat dalam hal ini melakukan defense “*de minimis*” sebagai lawan dari “*substansial similarity*”.
2. Penerapan prinsip *de minimis* dan prinsip *substansial similarity* dalam penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di Amerika

Pengakomodasian prinsip *de minimis* belum diatur secara jelas dalam UUHC. Hal ini perlu diatur, karena prinsip ini akan membatasi potensi gugatan berdasarkan prinsip *substansial similarity* yang mengada ada (tidak

beralasan). Suatu hal kecil dapat dianggap sebagai *substansial similarity* (bagi penggugat), tetapi juga dianggap sebagai “*de minimis*” (bagi tergugat).

Sedangkan, di Amerika sendiri baik *de minimis* maupun *substansial similarity* sendiri sudah digunakan dalam kasus kasus pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Perlunya dibuat peraturan khusus mengenai *de minimis* dalam ruang lingkup hak cipta.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa prinsip *de minimis* dapat diterapkan dalam berbagai macam persoalan, karenanya penulis menyarankan agar dapat dibuatnya peraturan khusus yang meregulasi tentang penggunaan *de minimis* dalam perlindungan hak cipta. Dengan demikian ada landasan hukum bagi *de minimis* dapat digunakan sebagai pembatasan bagi permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan dalam persidangan.

2. Perlunya ditetapkan kriteria penggunaan *de minimis* dalam hak cipta.

Penentuan kriteria *de minimis* dalam hak cipta sangat penting untuk ditetapkan. Yang mana kriteria tersebut nantinya akan ditetapkan bersama oleh mereka yang ahli dibidang masing-masing karya cipta, serta bagi mereka yang terlibat dalam industri karya cipta tersebut, serta pemerintah sebagai regulator. Hal ini dimaksudkan agar semua orang yang berhubungan dengan hak cipta tersebut mengetahui batasan yang pasti mengenai hal apa yang diperbolehkan dan hal apa yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2005. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976. **Hak Cipta**, Bandung: Binacipta.
- Damian, Eddy. 2015. **Hukum Hak Cipta**, Bandung: PT. Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedilah. 1993. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Bandung: Cet.1, PT. Citra Aditya Bakri
- Garner, Bryan A. 2009. **Black Law Dictionary**. Minnesota: West Publishing Co.
- Harjowidigdo, Rooseno. 1992. **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasibuan, Otto. **Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society**, Bandung: PT. Alumni.
- Hidayah, Khoirul, 2013. **Hukum Hak kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, UINMaliki Press,
- Janed, Rahmi. 2014. **Hukum Hak Cipta**, Jakarta: Citra Aditya.
- Lewis, Arthur. 2014. **Dasar-Dasar Hukum Bisnis**, Bandung: Nusa Media.
- Lindsey, Tim. 2006. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung: PT. Alumni.
- Margono, Suyud. 2010. **Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual**. Bandung: Nuansa Aulia.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta: Visi Media.
- _____. 2010. **Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual**. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- _____, 2011. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2005. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Abdulkadir. 2001. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. 2008. **Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)**, Jakarta: Erlangga Group.
- Rosidi, Ajip. 1984. **Undang-undang Hak Cipta, Pandangan Seorang Awam**. Jakarta: Djambatan.
- Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press. Sardjono, Agus. 2008. **Hak Cipta dalam Desain Grafis**. Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- _____, 2010. *Author's Right is Not Only Copyright*. Jurnal Hukum Internasional.
- Soekanto, Soerjono. 2012. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soelistyo, Henry. 2011. **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**. Jakarta: Rajawali Press.
- Stephen M. Steward, 1989. *Intenational Copyright and Neighbouring Rights*, Butterworths, London,
- Sterling, J. A. L. 1998. **World Copyright Law**. London: Sweet and Maxwell.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Usman, Rachmadi. 2003. **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**. PT Alumni, Bandung.
- Veech, Max L. dan Charles Moon. 1947. *"De Minimis Non Curat Lex"*. Michigan: Law Review.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

The United Nations. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*.

ARTIKEL JURNAL

Asian Law Group. 2002. *Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, AusAid.

Brown, Jeffrey. 2012. “*How Much Is Too Much? The Application Of The De Minimis Doctrine To The Fourth Amendment*”, Mississippi Law Journal Vol. 82

Cromer, Julie D. 2006. “*Harry Potter and The Three-Second Crime: Are We Vanishing De Minimis Defense From Copyright Law?*”, New Mexico Law Review.

Inest, Andrew. 2006. “*A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*”, Berkeley Technology Law Journal Vol. 21.

INTERNET

<http://insommia.net/hangout-vs-none-raditya-dika-plagiat/> diakses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB

<https://www.rollingstone.com/music/news/appeal-filed-in-led-zeppelin-stairway-to-heaven-trial-w472692> diakses pada tanggal 21 mei 2018 Pukul 09.00 WIB

